

PERGERAKAN MENUJU PEMBAHARUAN NUSANTARA



YPPTI_e

Yayasan
Pengembangan Pendidikan
& Telematika Indonesia

Penulis : Sri Harjono

TIM PENYUSUN

Penulis : Sri Harjono
Editor : Apri Kurniawan
Desain Sampul : Mahatma Walisana Alkautsar
Penata Letak : Erwin E Ananto
Penerbit : Yayasan Pengembangan
Pendidikan & Telematika
Indonesia (YPPTI)
Cetakan Pertama : April 2025

@ Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

PERGERAKAN MENUJU PEMBAHARUAN NUSANTARA



YPPTI_e

*Yayasan
Pengembangan Pendidikan
& Telematika Indonesia*

Penulis : Sri Harjono

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayau (1) hurud c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)



PENGANTAR

INDONESIA memiliki sejarah yang panjang sebagai satu bangsa besar yang hadir bersama naik turunnya peradaban. Puluhan kerajaan atau kesultanan hadir di wilayah Indonesia dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 ini baru memperingati hari kemerdekaan ke 79 tahun. Bandingkan dengan usia Kerajaan Majapahit yang mencapai 234 tahun (1293 – 1527 M). Kerajaan Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang membentang dari Sumatra hingga Papua, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, Timor Leste, Australia Barat dan Filipina Barat Daya.

Kerajaan Sriwijaya berusia lebih dari 600 tahun yaitu berdiri tahun 682 M dan runtuh pada abad ke-13 Masehi yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi Sumatera, Jawa, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, dan Sarawak.

NKRI yang baru berusia 79 tahun ini harus dirawat dengan baik berdasar cita-cita didirikannya yaitu sesuai Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kegagalan mewujudkan cita-cita proklamasi akan menjadi penyebab gagalnya NKRI. Dan para pendiri bangsa telah memberi bekal yang luar biasa yaitu Sumpah Pemuda dan asas negara Pancasila.

Buku berjudul Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara ini mengupas perjalanan bangsa Indonesia yang juga disebut Nusantara ini agar dapat selamat dan mampu mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Kecenderungan kesalahan arah perjalanan bangsa diingatkan agar lurus kembali ke jalur yang benar sesuai konstitusi. Peran para pemimpin yang sedang berada dalam panggung kekuasaan saat ini sangat penting. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menyelamatkan masa depan anak cucu bangsa Nusantara ini. Selamat membaca.

Penerbit



DAFTAR ISI

Pengantar	5
Pendahuluan	11
<hr/>	
Chapter 1	19
KERAJAAN MAJAPAHIT (1293 - 1527 M)	
<hr/>	
Chapter 2	29
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (1945 - Sekarang)	
<hr/>	
Chapter 3	35
TANAM PAKSA DAN POLITIK ETIS	
<hr/>	
Chapter 4	41
SUMPAH PEMUDA DAN IDENTITAS INDONESIA	
<hr/>	
Chapter 5	49
PENJAJAHAN JEPANG DAN PERSIAPAN KEMERDEKAAN	
<hr/>	
Chapter 6	57
ERA KEMERDEKAAN DAN KONSOLIDASI POLITIK	
1. Presiden RI pertama Soekarno (1945-1967)	59
2. Presiden RI kedua Soeharto (1967-1998)	93

3. Presiden RI ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie (1998 - 1999)	127
4. Presiden RI kelima KH Abdurachman Wahid (1999-2001)	133
5. Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri (2001-2004)	137
6. Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)	141
7. Presiden RI ke 7 Joko Widodo (2014-2024)	145
8. Presiden RI ke 8 Prabowo Subianto (2024 – 2029)	151

Chapter 7	159
-----------	-----

AGENDA PEMBAHARUAN

1. Dua Wajah Partai Politik: Tuduhan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan Penyalur Aspirasi - Pelayan Rakyat	159
2. Penegakkan Hukum: Mengampuni yang kuat, menghukum yang lemah	166
3. Ketimpangan dan Kemiskinan	168
4. Pendidikan : Kualitas Sumber Daya Manusia dan Inovasi Teknologi	174
5. Pertahanan dan Keamanan	177
6. Usulan dan Harapan	179

Daftar Pustaka	186
----------------	-----

Tentang Penulis	188
-----------------	-----





PENDAHULUAN

NUSANTARA adalah wilayah yang sekarang lebih dikenal dunia sebagai Indonesia, yang telah berdiri dengan berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan sudah memiliki sejarah yang panjang.

Pada tahun 1891 M, Pithecanthropus Erectus atau dikenal juga Manusia Jawa ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil tepi Sungai Bengawan Solo daerah Ngawi di Jawa Timur. Fosil purba tersebut diperkirakan hidup sekitar 700.000 hingga 1.000.000 tahun yang lalu, tepatnya pada zaman pleistosen tengah.

Selain itu, Jawa juga sudah mengenal Kalender. Penanggalan Jawa pertama kali diciptakan oleh Mpu Hubayun (911 SM) yang mengarah pada keselarasan dan keharmonisan alam semesta. Karena diciptakan berdasarkan asal usul atau isi

alam semesta, maka disebut sebagai Sangkan Paraning Bawana, yang mengakomodasi alam mikrokosmos dan makrokosmos. Jawa telah menjadi global genius, bangsa yang besar dan maju.

Kemudian di buku *Timaeus* dan *Critias* yang dituliskan Plato (427 - 347 SM) disampaikan bahwa dihadapan Selat Mainstay Haigelisi, ada sebuah pulau yang sangat besar yang dikelilingi oleh Samudra, itulah Bangsa Atlantis. Bangsa Atlantis adalah bangsa yang maju, bahkan menjadi pusat peradaban dunia dalam bentuk kebudayaan, kekayaan alam, ilmu dan teknologi serta keunggulan lainnya. Tanahnya subur dan hanya memiliki dua musim. Namun atlantis tenggelam akibat gempa bumi disertai tsunami.

Prof. Arysio Santos seorang geolog dan fisikawan nuklir dari Brasil, melakukan riset untuk menemukan dimanakah posisi Atlantis yang dituliskan Plato. Hasil riset kemudian diterbitkan dalam buku berjudul : *Atlantis, The Lost Continent Finally Found*, Prof. Santos mengambil kesimpulan bahwa sesuai tanda-tanda serta ciri-ciri yang disebutkan Plato, Atlantis adalah Indonesia sekarang.

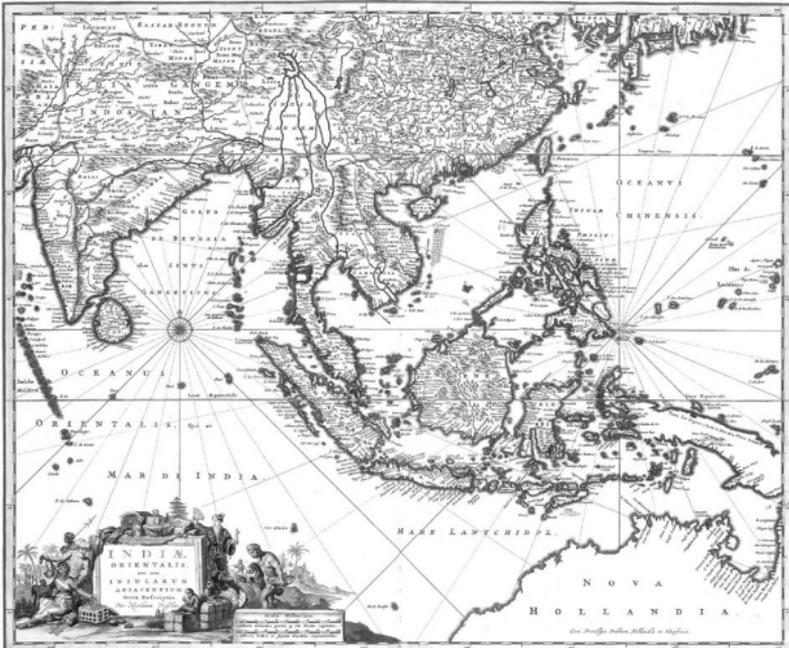
Atlantis lemuria yang kerap kami sebut lemuria agar lebih mudah, adalah daratan luas yang disebut orang Yunani

sebagai Padang Elys dan disebut orang Mesir sebagai Padang Alang-Alang (Sekhet Aaru). Sangat mungkin bahwa yang dimaksud “alang-alang” disini sebenarnya adalah padi yang tumbuh di rawa, seperti masih dijumpai di seluruh wilayah Indonesia hingga kini. Daratan ini yang digambarkan secara terperinci dalam Critias terendam dan sekarang ini membentuk Laut Jawa, persis di utara Pulau Jawa (Santos, 1997).

Selain itu juga disebut sebagai Sundaland, yang muncul dalam geografi Ptolemy yang ditulis sekitar tahun 150 M. Sundaland mencakup wilayah Asia Tenggara, yang kini telah tenggelam. Wilayah yang membentang luas dengan kebudayaan yang tumbuh dan hidup inilah yang disebut sebagai Nusantara.

NUSANTARA

Dalam khasanah kenegaraan, kata Nusantara pertama kali digunakan dalam Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapatih Gajah Mada tahun 1334 M. Dalam sumpah ini, wilayah Nusantara mencakup kurang lebih dari barat, Malaka, Tumasek, Sulu dan Sumatra sampai wilayah timur, Seram dan Papua. Hal ini dapat dimaknai bahwa pada masa itu



Asia Tenggara oleh Nicolaes Visscher I (1678)

Sumber : Wikipedia.com

Nusantara sebagai wilayah sudah lebih dahulu ada, sebelum Majapahit berdiri dan dipahami sudah membentang diantara pulau-pulau yang disebutkan dalam Sumpah Palapa dan Mahapatih Gajah Mada merasa mempunyai tugas historis untuk menyatukan kembali wilayah itu dalam naungan Kerajaan Majapahit, dengan mengikrarkan Sumpah Palapa disaksikan oleh Tribhuwana Tunggaladewi sebagai Ratu Majapahit.

Pada saat setelah Indonesia Merdeka, kata Nusantara

muncul kembali dan sudah memasuki diskursus resmi kenegaraan ketika Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 pada periode kepemimpinan Presiden RI ke-1 Soekarno. Deklarasi Djuanda mencakup empat hal pokok : 1. Cara penetapan teritorial laut peninggalan kolonial tidak sesuai lagi dengan kepentingan Bangsa Indonesia. 2. Sebagai negara berdaulat, sesuai kepentingan nasional, Indonesia dapat menetapkan perairan nasionalnya. 3. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan perairan, diantara dan sekitar pulau-pulaunya merupakan satu kesatuan. 4. Laut teritorial diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung terluar daripada kepulauan Indonesia.

Kemudian dilanjutkan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan pada saat Prof. Muchtar Kusuma Atmaja menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1982, Deklarasi Djuanda resmi diakui secara internasional dengan ditetapkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) dan sudah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985, yang kemudian melahirkan konsep Wawasan Nusantara pada periode kepemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi

yang saling terhubung serta penerapannya di tengah lingkungannya berdasarkan Asas Nusantara.

Pada tahun 1999 Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara dan secara resmi diundangkan melalui Keppres No. 126/2001 oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri. Tanggal itu dipilih bertepatan dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang menetapkan wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau dan laut sekitarnya yang tidak terpisahkan.

Kemudian pada amandemen UUD yang ke-2 tahun 2000, pada masa Ketua MPR Dr. HM. Amien Rais, kata Nusantara masuk dalam konstitusi Republik Indonesia UUD 1945, dalam Bab IXA tentang Wilayah Negara pasal 25E dan pada amandemen yang ke-4 berubah menjadi 25A, yang berbunyi sebagai berikut "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang". Namun tidak terdapat penjelasan maksud dari kata "ciri Nusantara" dalam pasal ini, berarti kata ini sudah cukup jelas dan dipahami sehingga tidak memerlukan penjelasan.

Setelah itu, pada masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko

Widodo, pada tanggal 15 Februari 2022 kata Nusantara masuk dalam UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara bernama Nusantara atau lebih dikenal dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara). Dalam undang-undang ini, kata Nusantara bermakna lebih material dan menjadi nama sebuah kota. Berbeda dengan diskursus kenegaraan sebelumnya, tentang kata Nusantara yang dimaknai lebih dalam dan luas.

Sekarang kita mengenal Nusantara dimasa lalu menjadi dan menamainya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paling tidak, ada dua fase waktu Nusantara yang memiliki wilayah membentang seperti awal Sundaland atau Jawa versi terdahulu, yakni fase Kerajaan Majapahit dan fase Negara Kesatuan Republik Indonesia.





KERAJAAN MAJAPAHIT

(1293 - 1527 M)

Sebelum Majapahit, sudah berdiri lebih dahulu kerajaan-kerajaan lain, seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan (abad ke-4 M), Kerajaan Tarumanegara di Jawa Bagian Barat (abad ke-4 hingga ke-7 M), Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatra (abad ke-7 hingga ke-11 M), Kerajaan Mataram di Jawa Tengah yang kemudian pindah ke Jawa Timur (abad ke-7 hingga ke-10 M), Kerajaan Samudera Pasai di Aceh (didirikan abad ke-12 M). Namun kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan yang terluas adalah Kerajaan Majapahit. Seperti yang tertulis di Naskah Nagarakretagama, wilayah Majapahit mencakup Jawa, Bali, Lombok, Flores, Timor, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Kepulauan Sulu (Filipina), Sulawesi, Maluku, Papua dan lainnya.



Kapal-kapal Jung Jawa, yang mampu menampung ratusan prajurit.

Sumber : intisari.grid.id

Kerajaan Majapahit berdiri didahului oleh kejatuhan Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara melancarkan kampanye Ekspedisi Pamalayu untuk membendung serangan Cina dengan cara menguasai wilayah Melayu dan kerajaan-kerajaan lain, selain yang di Jawa. Ekspedisi ini dimulai tahun 1275 M dipimpin oleh Kebo Anabrang. Dalam catatan versi lain dipimpin oleh Indrawarman. Ekspedisi ini, yang oleh beberapa kalangan nantinya dianggap menjadi sumber inspirasi Mahapatih Gajah Mada untuk mengucapkan Sumpah Palapa. Namun, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan oleh Jayakatwang Raja Daha Kediri, Raja Kertanegara terbunuh dan runtuhlah Kerajaan Singasari sehingga Ekspedisi Pamalayu terhenti.

Selain itu, berdirinya Kerajaan Majapahit juga didahului serangan Pasukan Tar-Tar ke Daha Kediri. Pada tahun 1290 dan 1291, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa untuk menemui Raja Kertanegara agar tunduk kepada Kaisar Dinasti Yuan dan penguasa Kekaisaran Mongol serta bersedia membayar upeti sebagai tanda kerajaan bawahan. Namun, Men Shi atau Meng-qi utusan Kaisar Mongol diperlakukan tidak baik dan diusir secara kasar, sehingga mengakibatkan kemurkaan Kaisar Mongol dan kemudian memerintahkan penyerangan ke Kerajaan Singasari.

Serangan ke Kerajaan Singasari menurut Naskah Yuan Shi (Sejarah Dinasti Yuan), tertulis "20.000 - 30.000 prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi dan Huguang di Tiongkok Selatan, Pemimpinnya adalah Shi-Bi orang Mongol, Ike Mese orang Uyghur dan Gaoxing orang Tiongkok. Pasukan menggunakan 500 - 1000 kapal dan dilengkapi dengan perbekalan untuk satu tahun". Namun Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara berhasil melakukan kontak dan membuat kesepakatan dengan Pasukan Tar-Tar yang sudah mendarat di Jawa. Dalam serangan ini, Penguasa Singasari telah berganti dari Raja Kertanegara ke Prabu Jayakatwang. Raden Wijaya membuat kesepakatan untuk melakukan penyerangan bersama ke Daha Kediri. Apabila Raja Jayakatwang berhasil dikalahkan, nantinya Raden Wijaya

bersedia takluk dan menjadi raja bawahan Kekaisaran Mongol. Penyerangan ini juga dibantu oleh Pasukan Arya Wiraraja dari Madura. Namun, setelah Raja Jayaktwang berhasil dikalahkan, Raden Wijaya malah balik menyerang Pasukan Tar-Tar. Pasukan Tar-Tar kocar-kacir, kalah dan sebagian kecil yang selamat melarikan diri dan pulang ke Cina-Mongol. Kemudian Majapahit berdiri dengan Raden Wijaya sebagai Raja pertama.

RAJA-RAJA KERAJAAN MAJAPAHIT DENGAN IBUKOTA TROWULAN :

1. Raja Kertarajasa Jayawardhana (Raden Wijaya)	(1294 - 1309)
2. Raja Sri Jayanagara	(1309 - 1328)
3. Ratu Tribhuwana Tunggaladewi	(1328 - 1350)
4. Raja Rajasanagara (Hayam Wuruk)	(1350 - 1389)
5. Wikramawardana	(1389 - 1429)
6. Ratu Suhita (Dyah Ayu Kencana Wungu)	(1429 - 1447)
7. Raja Wijayaparakramawardhana	(1447 - 1551)
8. Raja Rajasa Wardhana	(1451 - 1453)
9. Raja Girisawardhana	(1456 - 1466)
10. Raja Singhawikramawardhana	(1466 - 1478)
(Sumber : Ricleft, 1981)	
11. Raja Bhre Kertabumi (Prabu Brawijaya V)	(1468 - 1478)
Prabu Brawijaya VI	(1478 - 1489)
12. Prabu Brawijaya VII	(1489 - 1527)
(Sumber Website : sma13smg.sch.id)	

Sejak Majapahit berdiri terjadi beberapa kali pemberontakan dan yang terakhir adalah pemberontakan Sadeng-Keta tahun 1331 M atau 48 tahun sejak Majapahit berdiri. Menurut catatan sejarah, ada 6 pemberontakan di Majapahit :

1. Pemberontakan Ranggalawe	(1295 M)
2. Pemberontakan Lembu Sora	(1300 M)
3. Pemberontakan Nambi	(1316 M)
4. Pemberontakan Ra Kuti	(1319 M)
5. Pemberontakan Ra Tanca	(1328 M)
6. Pemberontakan Sadeng-Keta	(1331 M)

Kalau dilihat dan dianalisa lebih jauh, pemberontakan yang terjadi adalah akibat dari persaingan kekuasaan antar elit kerajaan, karena hampir semua pemberontak adalah orang dekat Raden Wijaya. Bahkan, orang-orang yang berperan dalam pendirian Kerajaan Majapahit. Ranggalawe adalah salah satu panglima dalam membangun pasukan dan penyerangan ke Daha Kediri. Lembu Sora juga adalah abdinya Raden Wijaya dan penasehat dalam penyerangan ke Daha Kediri. Nambi adalah patih pertama sejak berdirinya Kerajaan Majapahit. Ra Kuti dan Ra Tanca adalah anggota Dharmaputra yang dibentuk oleh Raden Wijaya, Sedangkan pemberontakan Sadeng dan Keta adalah efek dari pembunuhan Patih Nambi.

Pemberontakan terjadi pada masa empat raja awal Kerajaan Majapahit, yakni Raden Wijaya, Sri Jayanagara, Tribhuwana Tunggaladewi dan Hayam Wuruk. Tahun-tahun awal adalah tahun konsolidasi politik dari kekuasaan Majapahit.

SUMPAH PALAPA DAN PATIH GAJAH MADA (1334 - 1364 M)

Masa Pemerintahan Mahapatih Gajah Mada selama 30 tahun (1334 - 1364). Meliputi tiga masa raja, yakni Raja Jayanagara, Ratu Tribhuwana Tunggaladewi dan Raja Hayam Wuruk. Sebelumnya Gajah Mada sudah menjadi patih di Kahuripan dan Daha (1319 - 1334) pada masa Raja Jayanagara. Pada saat Raja Jayanagara diangkat sebagai

Raja Majapahit, Gajah Mada juga diangkat menjadi Patihnya Majapahit.



Patung Gadjahmada

Sumber : tirtto.id

Sumpah Palapa Patih Gajah Mada disaksikan oleh Ratu Tribhuwana Tunggaladewi, dilakukan saat pengangkatan menjadi Mahapatih tahun 1334 M.

Bunyi sumpah sebagai berikut :

“Sira Gajah Mada patih amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, Sira Gajah mada : “Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalan ring Gurun, ring Seran, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dampo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.

Sumpah Palapa ini memiliki makna penting dalam konteks sejarah dan kebudayaan Indonesia. Kata Nusantara secara eksplisit masuk menjadi statemen Konstitusi Majapahit. Sumpah ini mencerminkan tekad Gajah Mada untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Sumpah Palapa adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Nusantara, yang pada masa itu terdiri dari berbagai kerajaan dan suku yang berbeda.

Patih Gajah Mada diberhentikan oleh Raja Hayam Wuruk tahun 1364 M. Gajah Mada melakukan kesalahan dalam melakukan komunikasi dengan Kerajaan Pajajaran. Proses pernikahan Raja Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka putri Raja Pajajaran batal dan bahkan menjadi peristiwa politik yang dikenal sebagai Perang Bubat (1364 M). Akibat peristiwa itu, hubungan Majapahit dan Pajajaran menjadi lebih buruk.

Namun, Raja Hayam Wuruk masih terus berkuasa sampai tahun 1389 M atau 25 tahun setelah pemberhentian Gajah mada sebagai Mahapatih. Pada saat Raja Hayam Wuruk inilah Majapahit mulai mengalami masa keemasannya. Dengan wilayah yang membentang luas dari Papua sampai Semenanjung Malaya (Malaysia dan Singapura sekarang) dan juga Kepulauan Sulu (Filipina Selatan).

Setelah Raja Hayam Wuruk, masa pemerintahan kerajaan selanjutnya dilanjutkan oleh Raja Wikramawardana. Bahkan dalam versi lain, Pemerintahan Majapahit terbagi menjadi dua, Majapahit Barat diperintah oleh Raja Wikramawardana dan Majapahit Timur diperintah oleh Bhre Wirabumi. Dari sinilah muncul persaingan elit kerajaan memperebutkan pewaris sah Raja Majapahit, yang akhirnya Meletuslah Perang Paregreg (1404 - 1406) dan berakhir dengan terbunuhnya Bhre Wirabumi. Pasca Perang Paregreg, Majapahit terus mengalami kemunduran akibat perang saudara untuk memperebutkan tahta Majapahit.

SIRNO ILANG KERTANING BUMI (1478 M)

Perang saudara berlanjut pada tahun 1478 M, Raja Majapahit yang berkuasa adalah Bhre Kertabumi. Pada tahun itu, Majapahit diserang oleh Prabu Girindrawardana Raja dari

Daha Kediri, yang juga keturunan Raja Majapahit sebelum Bhre Kertabumi. Bhre Kertabumi kalah, kemudian Prabu Girindawardana dinobatkan sebagai Raja Majapahit dan ibukota pindah ke Daha Kediri. Dalam catatan Babad Tanah Jawi, tahun ini dituliskan dengan sengkalan "Sirno Ilang Kertane Bhumi", dengan makna "lenyapnya kemakmuran bumi" sebagai ruhnya Kerajaan Majapahit.

Tetapi, Kerajaan Majapahit benar-benar runtuh pada tahun 1527 M. Patih Udhara, mencoba membuka hubungan dengan Portugis dan dikarenakan Majapahit sudah dikuasai Patih yang bukan dari dinasti keturunan Raden Wijaya dan menjalin hubungan dengan penjajah Portugis, maka Majapahit diserang oleh Sultan Trenggono, dalam versi lain diserang oleh Sultan Pati Unus dari Demak dan akhirnya jatuh. Nusantara selanjutnya memasuki masa kerajaan yang kecil-kecil dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Namun dari sisi regenerasi dan legitimasi, Kerajaan Majapahit dilanjutkan oleh Kesultanan Demak (1478 M - 1554 M). Kesultanan Pajang (1554 M - 1587 M) dan kemudian Kesultanan Mataram Islam mulai tahun 1584 M dan bersamaan dengan terjadinya kolonialisme Barat di Nusantara. Kesultanan Mataram Islam akhirnya pecah menjadi empat, yakni Kasunanan Solo, Mangkunegaran, Kesultanan Yogya dan Pakualaman dan masih berlangsung sampai sekarang.





NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (1945 - Sekarang)

SETELAH MASA KERAJAAN, Nusantara memasuki masa-masa kolonialisme. Penjajahan dilakukan oleh Portugis (1511 - 1595 M), Spanyol (1521 - 1529 M), Belanda (1602 - 1942 M), Perancis (1806 - 1811 M), Inggris (1811 - 1816 M) dan Jepang (1942 - 1945 M).

Penjajahan yang dilakukan di wilayah Nusantara, tidak terlepas dari kondisi geopolitik dunia pada masa itu. Setelah Kekhalifahan Islam berkuasa selama 800 tahun, Raja Ferdinand dan Ratu Isabela berhasil mengalahkan Andalusia pada tahun 1492 M. Andalusia waktu itu meliputi wilayah Spanyol, Portugis dan wilayah selatan Perancis. Sebelumnya, pada tahun 1453 M, Konstantinopel sebagai

Kekaisaran dari Romawi Timur ditaklukkan oleh Muhammad II atau Al Fatih dari Kekhalifahan Turki Utsmani, sehingga jalur rempah-rempah dalam penguasaan Kekhalifahan Islam, yang akhirnya membuat kerajaan-kerajaan memulai penjelajahan ke wilayah timur untuk mencari rempah-rempah langsung dari asalnya. Dengan semangat Gold (Emas dan Kekayaan), Glory (Kekuasaan dan Kejayaan) dan Gospel (Penyebaran Agama) maka dimulailah era kolonialisme dan imperialisme barat ke seluruh dunia.

Spanyol berhasil memasuki wilayah Nusantara dan menguasai Maluku tahun 1521 M. Namun, sebagai akibat dari Perjanjian Sarogosa dengan Portugis, Spanyol harus meninggalkan Maluku tahun 1529 M. Sebelumnya, pada tahun 1511 M, Portugis telah menguasai Malaka. Dari Malaka, kemudian masuk dan menguasai Maluku dan beberapa wilayah Nusantara yang lain. Pada tahun 1595 M, Portugis bertempur dengan beberapa penguasa lokal dan banyak mengalami kekalahan, akhirnya harus pergi dari Nusantara dan tinggal Timor Timur dalam penguasaannya. Bersamaan dengan itu pada tahun 1595 M, Belanda masuk dan mulai menguasai Nusantara sampai tahun 1942 M, selama kurang lebih 350 tahun.

Faktor geopolitik dunia yang lain juga menjadi pemicu pergantian negara penjajah Indonesia. Penjajahan Perancis

misalnya, adalah efek dari perang di Eropa. Ketika Belanda dikalahkan oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis, secara otomatis Indonesia dijajah oleh Perancis. Napoleon mengangkat adiknya, Louis Bonaparte menjadi penguasa Belanda dan kemudian dikirimlah Herman Willem Dandels sebagai utusan untuk memerintah negara jajahan Indonesia. Masa ini juga dikenal sebagai salah satu masa penjajahan yang paling kejam. Salah satu penanda sejarah periode ini adalah jalan dari Anyer sampai Panarukan, yang berhasil dibuat pada masa ini dengan metode kerja paksa.

Kemudian setelah Perancis mengalami kekalahan melawan Inggris, otomatis Indonesia dijajah oleh Inggris. Dikirimlah Sir Thomas Stamford Bingley Raffles sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1811 - 1816) dan Letnan Gubernur Jenderal Bengkulu (1818 - 1824). Selama masa pemerintahannya banyak perubahan dilakukan misalnya, sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diterapkan oleh Belanda, diubah menjadi sistem pajak bumi dan sewa tanah (*landrente*). Raffles juga berusaha menghapus penyerahan wajib hasil panen, kerja rodi dan wajib tanam bagi petani.

Namun setelah terjadi Konvensi London, Inggris harus menyerahkan Indonesia sebagai negara jajahan Belanda kembali. Penyerahan dilakukan di Batavia pada tahun 1816. Pasca penyerahan ini, terjadi banyak perlawanan terhadap

penjajah Belanda, tercatat sebagai berikut : 1. Perlawanan Pattimura (1817 - 1818), Perang Padri (1821 - 1837), Perang Jawa (1825 - 1830), Perang Aceh (1873 - 1912), Perang Bali mulai 1848 sampai Perang Kusamba (1849), Perang Puputan Badung (1906) dan Perang Puputan Klungkung (1908). Perang Banjarmasin (1889 M). Sebelumnya sudah terjadi Perang Batavia oleh Sultan Agung (1628-1629), Perang Makassar (1666 - 1669) serta masih banyak perang dan perlawanan yang lainnya. Dari semua perlawanan yang terjadi, tidak ada yang berhasil mengusir penjajah Belanda dari wilayah Nusantara.

Dari perlawanan diatas, perlawanan terlama adalah Perang Aceh, yang baru berakhir tahun 1903 M dengan penyerahan diri Sultan Alaudin Muhammad Daud Syah dan Panglima Poliém dan ditangkapnya Cut Nyak Dien. Namun perlawanan dengan skala paling besar adalah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro.

Akibat perlawanan ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000-an jiwa, sementara korban tewas pihak Belanda mencapai 8.000 pasukan Belanda dan 7.000 pasukan pribumi atau sekitar seperempat ($\frac{1}{4}$) dari pasukan Belanda dan menelan biaya kurang lebih 2 juta golden atau setara dengan 10 tahun Anggaran Kerajaan



Lukisan Peristiwa Penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh (Istana Negara Jakarta)

Sumber : Kompas.com

Belanda. Perlawanan ini berakhir tahun 1830, dengan ditangkanya Pangeran Diponegoro dengan cara yang licik di Magelang, yang kemudian diasingkan ke Manado dan selanjutnya ke Makassar hingga wafat tahun 1855 M. Ada yang berpendapat, bahwa sisa-sisa pasukan Pangeran Diponegoro menempuh jalur perjuangan berbeda, dengan memasuki bidang pendidikan seperti pondok pesantren dan padepokan, serta pada saat adanya Politik Etis mereka juga membuat sekolah-sekolah, yang nantinya pada periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan menjadi sumber rekrutmen aktifis dan pasukan untuk perang kemerdekaan melawan penjajah.





TANAM PAKSA DAN POLITIK ETIS

Pasca Perang Jawa, Belanda berkuasa penuh atas Pulau Jawa. Seperti kata Rickleft :

"Pada tahun 1830 dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa. Untuk pertama kalinya pihak Belanda mampu mengeksploitasi dan menguasai seluruh pulau ini dan tidak ada tantangan yang serius sampai abad XX" (Ricklefs, 2010).

Sementara itu, dalam rangka melanggengkan kekuasaan ditanah jajahan, Belanda mulai menerapkan strategi yang berbeda. Untuk mengisi kekosongan kas, akibat keterlibatan Belanda dalam perang di Eropa dan biaya yang ditimbulkan

oleh Perang Jawa, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Disisi lain, dalam rangka mengambil hati penduduk jajahan, belanda menerapkan Politik Etis.

Peraturan pokok Sistem Tanam Paksa tercantum dalam lembaran negara staatsblad tahun 1834 M mencakup 1. Penduduk diwajibkan menyerahkan sebagian dari tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang dijual di pasar Eropa. 2. Tanah pertanian yang disediakan, tidak boleh melebihi seperlima ($\frac{1}{5}$) dari tanah yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut, tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. 4. Tanah yang disediakan tersebut bebas dari pajak



Sistem tanam paksa dianggap menyiksa masyarakat di masa penjajahan Belanda.

Sumber : cnnindonesia.com

tanah. 5. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika ditaksir melebihi biaya pajak, maka kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 6. Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani, menjadi tanggung jawab pemerintah. 7. Bagi yang tidak memiliki tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan dan pabrik milik pemerintah selama 65 hari per tahun. 8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi dan Pegawai-Pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.

Aturan dalam sistem ini kelihatannya bagus dan adil. Namun dalam pelaksanaannya, tidak ada sistem sama sekali yang diterapkan. Aturan ini hanya janji manis Belanda, sistem ini diterapkan dengan banyak penyimpangan. 1. Jatah tanah yang diserahkan melebihi seperlima ($\frac{1}{5}$) dari luas tanah, apalagi kalau tanahnya subur. 2. Rakyat akhirnya diminta lebih banyak mencurahkan waktu dan tenaganya untuk tanaman ekspor, sehingga tanaman sendiri menjadi terbengkalai. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja lebih dari seperlima ($\frac{1}{5}$) tahun. 4. Kelebihan hasil panen tanaman ekspor tidak dikembalikan ke petani. 5. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani, sehingga sistem tanam paksa ini sangat merugikan petani dan meningkatkan kesengsaraan serta penderitaan hidup rakyat jajahan.

Disisi lain, pihak Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar. "Sejak tahun 1831, anggaran belanja kolonial Indonesia sudah seimbang dan sesudah itu, hutang-hutang lama VOC dilunasi. Uang dalam jumlah yang sangat besar dikirim ke Negeri Belanda, dari tahun 1831 hingga 1877, Perbendaharaan Negeri Belanda menerima 832 juta florins (f). Sebelum tahun 1850, kiriman uang ini mengisi sekitar 19% dari Pendapatan Negara Belanda. Lalu menjadi sekitar 32% pada tahun 1851 - 1860 dan sekitar 34% di tahun 1860 - 1866" (Ricleft, 2010, hal 268).

Bersamaan dengan itu, muncul beberapa aktivis dari Belanda seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer memprakarsai gagasan Politik Etis sebagai bentuk balas budi untuk diterapkan di Indonesia. Maka, sejak tahun 1901 Politik Etis diterapkan. Kebijakan Politik Etis mencakup tiga hal : 1. Irigasi (Pengairan). 2. Transmigrasi, berdasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria (1870) Program Transmigrasi dimulai tahun 1905. 3. Pendidikan, akan tetapi dalam pelaksanaannya, program ini tetap digunakan untuk memenuhi kepentingan Belanda di negara jajahan. Pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai tingkat rendah Belanda, irigasi dibangun di daerah-daerah Perkebunan Belanda dan Transmigrasi dilakukan ke luar Jawa, khususnya ke Sumatra, untuk memenuhi kebutuhan



Salah satu lembaga bacaan yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda adalah Komisi Bacaan Rakyat (KBR).

Sumber : netralnews.com

tenaga kerja Perusahaan Belanda yang di Sumatra, bahkan transmigrasi juga dilakukan ke Suriname dan New Kaledonea.

Walaupun demikian, nampaknya Politik Etis juga melahirkan satu generasi baru terdidik di negeri jajahan, seperti HOS Tjokroaminoto, Soekarno, dr. Wahidin Soedirohoesodo, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Sam Ratulangi, J. Leimena dan masih banyak lagi yang lainnya, yang pada akhirnya juga melakukan perlawanan kepada Belanda dengan membangun pergerakan-pergerakan yang kita kenal dengan Pergerakan Nasional.





SUMPAH PEMUDA DAN IDENTITAS INDONESIA

Dalam konteks global, pada akhir tahun 1800 M dan awal tahun 1900 M juga ditandai dengan munculnya banyak ideologi-ideologi perjuangan dunia dalam rangka melakukan transformasi masyarakat. Selain gerakan yang berakar dari konsep demokrasi yang sudah berkembang, seperti di Perancis dan Amerika Serikat, ada juga ideologi yang berbasis nasionalisme kebangsaan sampai gerakan ultranasionalisme seperti Nazi Jerman, diilhami semangat keagamaan seperti Gerakan Pembaharuan Islamnya Muh. Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, juga ada yang berbasis pemikiran filsafat Marxisme yang melahirkan negara Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina (RRC).

Dari masing-masing ideologi di atas, semuanya tumbuh dan saling melakukan penetrasi serta mempengaruhi masyarakat banyak negara dan bangsa, termasuk masuk ke negara jajahan Belanda di wilayah Nusantara. Bersamaan dengan situasi global tersebut dan kondisi dalam negeri pasca penerapan Politik Etis, maka lahirlah pergerakan-pergerakan nasional dengan latar belakang ideologi masing-masing, antara lain : Sarekat Dagang Islam (1905), Budi Utomo (1908), Indische Partij (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Indische Sociaal Democratische Vereeniging, ISDV (1914), yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, PKI (1924), Partai Nasional Indonesia (1927), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926). Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia (mulai 1914), Organisasi Kepanduan (mulai 1920 sampai sekarang), Taman Siswa (1922), Partai Indonesia (1931), Gerakan Wanita (mulai 1921 sampai sekarang) dan banyak pergerakan-pergerakan lain yang lahir dan tumbuh, yang kesemuanya mengarah pada Kebangkitan Rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Dari semua pergerakan yang ada, nama "Indonesia" pertama dipakai oleh Perhimpunan Indonesia (1908). Perhimpunan ini dipelopori oleh Pelajar Indonesia yang belajar di Negeri Belanda yakni Sutan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Penggunaan nama Indonesia ini memiliki makna, 1. Untuk



Perhimpunan Indonesia (PI) adalah organisasi pergerakan pertama menggunakan istilah "Indonesia".

Sumber : intisari.grid.id

menunjukkan identitas bangsa, bahwa diatas muka bumi ini ada satu bangsa bernama Bangsa Indonesia, 2. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian sendiri, tidak sama dengan kepribadian Belanda, 3. Kata Indonesia, menunjukkan arah tujuan perjuangan yang lebih konkret, yaitu pembentukan negara yang bebas dan berdaulat. Nama Indonesia ini yang nanti setelah pernyataan kemerdekaan, dipilih menjadi nama negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pergerakan yang tumbuh diilhami oleh banyak latar belakang ideologis, seperti Budi Utomo, lebih Jawa nasionalis, Taman

Siswa yang kejawen, kemudian Perhimpunan Indonesia yang nasionalis, Syarekat Islam, Muhammadiyah dan NU yang diilhami Gerakan Islam Nasionalis, ISDV yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia yang diilhami oleh Marxisme dan Komunisme, ada PNI yang nasionalis. Bahkan beberapa kelompok ideologis juga memiliki relasi langsung dengan ideologi di luar negeri, seperti PKI yang berhubungan dengan Rusia dan Cina. Perbedaan ideologi ini, nantinya akan berlangsung juga setelah pasca kemerdekaan, dimana pergerakan telah berubah bermetamorfosis menjadi partai politik dan masing-masing berjuang agar ideologinya bisa menjadi dasar dan berpengaruh dalam proses berbangsa dan bernegara.

Selain itu, berkembang juga organisasi yang berbasis pada primordialisme seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Perkumpulan Pemuda Katolik Jawa, Jong Islamieten Bond dan lain-lain. Namun, diluar perbedaan-perbedaan tersebut, kesemuanya mempunyai kesamaan yaitu mencapai cita-cita Indonesia yang Merdeka.

Bersamaan dalam hiruk-pikuk kegiatan pergerakan nasional, muncullah gagasan para pemuda yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda.

Dalam kongres tersebut, melahirkan Sumpah Pemuda dan Lagu Indonesia Raya karya WR Supratman pertama kali dinyanyikan.

Bunyi Sumpah Pemuda sebagai berikut :

- Pertama : Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia.*
- Kedua : Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.*
- Ketiga : Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.*

Kegiatan ini mempunyai makna yang strategis, dilatarbelakangi oleh semangat nasionalisme yang tinggi yang secara tidak langsung telah melahirkan 2 (dua) simbol Persatuan Bangsa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Indonesia, yang nanti setelah pernyataan kemerdekaan disahkan sebagai bahasa nasional, yang menjadi bahasa pemersatu Bangsa Indonesia sampai saat ini. Kedua, lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya juga ditetapkan sebagai lagu Kebangsaan Bangsa Indonesia, yang selalu kita nyanyikan secara patriotik sampai saat ini.

Hiruk-pikuk kegiatan pergerakan nasional terus berjalan, semakin bervariasi gerakannya dan semakin masif, juga terbagi menjadi dua golongan yang satu kooperatif dengan Pemerintah Belanda seperti Budi Utomo. Ada juga golongan yang tidak kooperatif seperti PNI, PKI dan Partindo.

Pada saat yang bersamaan ditingkat global terjadi Perang Eropa antara Jerman dan Polandia (1939 M), dan akhirnya memicu perang besar menjadi perang dunia ke-2, dengan terjadinya poros Jerman, Italia dan Jepang di satu pihak, melawan negara-negara sekutu di pihak lain. Perang dunia ke-2 ini, nantinya dimenangkan oleh sekutu dan mengubah struktur geopolitik dunia. Kemudian diantara negara-negara pemenang perang sepakat untuk dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1945, dalam rangka untuk mencegah terjadinya perang besar lagi di masa depan. Disepakati oleh 5 negara pemenang perang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto yakni AS, Perancis, Inggris, Cina dan Uni Soviet. Blok pemenang perang yang menjadi anggota Dewan Keamanan ini terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pro kapitalisme dan demokrasi seperti AS, Perancis dan Inggris, serta Cina dan Rusia yang berideologi Marxisme dan Komunisme. Kemudian dua blok ini saling berkompetisi dalam rangka melebarkan pengaruh ke seluruh dunia sampai sekarang, sehingga terjadi banyak

titik konflik dan perang antar negara, sehingga lembaga PBB difungsikan menjadi semacam clearing house atas sengketa antara negara, termasuk nanti berperan penting dalam proses Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

Selain itu, dalam proses perang dunia ke-2 ini, tentara dan penguasa Belanda dikalahkan oleh Jepang dan memaksa Belanda untuk menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Jepang pertama mendarat melalui Tarakan, Kalimantan Timur, Pontianak, Banjarmasin kemudian memasuki Jawa dan menguasai Batavia. Sesuai dengan Perjanjian Kalijati (1942) Belanda menyerah tanpa syarat dan harus hengkang dari Bumi Indonesia. Dan mulai tahun 1942 Indonesia memasuki babak baru penjajahan Jepang dan konstelasi politik pra kemerdekaan yang berbeda juga dari masa penjajahan Belanda.





PENJAJAHAN JEPANG DAN PERSIAPAN KEMERDEKAAN

Pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan baik dari Rakyat Indonesia. Jepang mencitrakan diri sebagai saudara tua dari Rakyat Indonesia. Jepang mengizinkan diputarnya lagu Indonesia Raya di radio-radio pada awal kedatangannya. Selain itu, Bendera Merah Putih juga diizinkan dikibarkan disamping Bendera Jepang. Dan Bendera Merah Putih ini, nantinya dijadikan sebagai bendera kebangsaan Republik Indonesia.

Namun kejadian ini tidak berlangsung lama, Jepang mengambil langkah yang represif sebagai dampak dari perang Pasifik melawan sekutu. Jepang menyita seluruh

aset dan infrastruktur Belanda untuk kepentingan Jepang. Akibatnya perekonomian menjadi lumpuh. Jepang juga menerapkan Romusha, sistem kerja paksa yang mewajibkan rakyat bekerja untuk kepentingan Jepang. Jepang juga menyita harta kekayaan pribadi demi kepentingan perang dan banyak perempuan dipaksa menjadi Jugun lanfu, Wanita penghibur tentara Jepang.

Selain itu, Jepang juga memobilisasi pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi tentara cadangan, baik melalui 1. PETA (Pembela Tanah Air) di Jawa, 2. Heiho (Prajurit Pembantu Jepang) dan 3. Giyugun (Tentara Sukarela) di Sumatra. Jepang juga memobilisasi rakyat pedesaan dengan membentuk Tonarigumi (Rukun Tetangga) dan Nogyo Kumiai (Koperasi Pertanian). Langkah ini dilakukan dalam rangka kontrol ketat kepada rakyat sekaligus peningkatan produksi pertanian untuk kepentingan perang Jepang melawan sekutu.

Masa-masa yang sulit secara ekonomi, yang mengakibatkan “paceklik” dialami rakyat Indonesia. Kekurangan sandang dan pangan diderita Rakyat Indonesia, bahkan banyak rakyat hanya bisa berpakaian menggunakan karung goni. Penyakit TBC, kudis dan busung lapar mewabah dimana-mana. Masa paceklik sudah berubah menjadi “pageblug” meminjam istilah orang Jawa.

Di sisi lain, Jepang juga terus melakukan propaganda agar Rakyat Indonesia mendukung Jepang. Dibentuklah organisasi-organisasi yang disiapkan berperan untuk menuju kemerdekaan, seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) 1942 dipimpin Mr. Syamsudin (Raden Sjamsoeddin), juga Majelis Syura Muslimin Indonesia 1943 dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari, juga ada Pusat Tenaga Rakyat (Putera) 1942 dipimpin oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan KH. Mas Mansyur. Juga Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa tahun 1944. Bahkan pada bulan April tahun 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI melakukan sidang-sidang dan akhirnya tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkan setelah selesai menjalankan tugasnya menyelesaikan Undang-Undang dan persiapan untuk kemerdekaan lainnya. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ir. Soekarno sebagai Ketua dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua.

Bersamaan dengan itu, walaupun Perang Dunia ke-2 masih terus berkecamuk, akan tetapi tanda-tanda kekalahan pihak "Poros" atau "Sentral" mulai kelihatan. Pasukan Jerman mulai terdesak di banyak medan perang. Pada tanggal 28 April 1945, Benito Mussolini tertembak dan Italia kalah

perang. Pada tanggal 30 April 1945, Hitler melakukan bunuh diri, dan Pasca kekalahan Pasukan Jerman di Berlin akibat serangan Tentara Merah Soviet, Jerman menyerahkan tanpa syarat kepada sekutu di tanggal 7 Mei 1945. Amerika Serikat menjatuhkan 2 (dua) bom atom ke Jepang, di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan di Nagasaki (9 Agustus 1945). Kehancuran yang diakibatkan oleh bom ini membuat Jepang memutuskan untuk menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito menyampaikan melalui pengumuman di radio nasional.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Dari hasil pembicaraan diketahui bahwa pasukan Jepang mengalami banyak kekalahan di medan tempur dan disampaikan bahwa pihak Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi bisa dilaksanakan beberapa hari pasca pertemuan dengan Marsekal Terauchi.

Setelah kepulangan Soekarno dari Vietnam, Sutan Sjahrir mendesak Soekarno untuk segera melakukan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia, namun Soekarno masih belum bisa memberikan keputusan, khawatir bakal menimbulkan konflik yang besar. Kemudian terjadilah peristiwa Rengasdengklok, tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda pejuang yakni Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh membawa Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok dengan maksud agar Soekarno dan Hatta tidak dalam pengaruh Jepang. Para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dimediasi oleh Achmad Soebardjo akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan kembalilah mereka ke Jakarta.

Akhirnya pada malam tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Achmad Soebardjo berkumpul di rumahnya Laksamana Maeda untuk mengadakan rapat persiapan proklamasi. Dan malam itu, penyusunan teks proklamasi dilakukan Soekarno, Hatta dan Achmad Soebardjo, dengan disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, BM Diah dan Sayuti Melik. Teks Proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik.

Bertempat di kediaman Soekarno jalan Pegangsaan Timur No. 56, pada tanggal 17 Agustus acara proklamasi kemerdekaan dilakukan.

PROKLAMASI.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05.

Atas nama bangsa Indonesia.

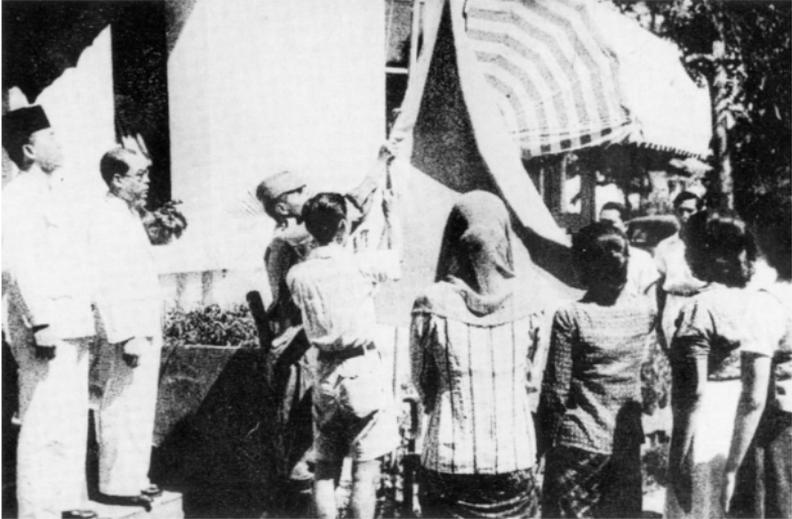
Soekarno/Hatta.

Soekarno . -
Hatta

Naskah Proklamasi

Sumber : antaranews.com

Soekarno membacakan teks proklamasi pada pukul 10.00 pagi dan dilanjutkan sambutan. Setelah itu dikibarkan bendera merah putih serta dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanggal 18 Agustus, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengadakan rapat dan mengesahkan undang-undang dasar sebagai dasar negara, yang sekarang kita kenal sebagai UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kedaulatan ditangan rakyat yang dilakukan secara sukarela oleh MPR. Kemudian dipilihlah Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan diambil sumpah oleh sebuah Komite Nasional.



Pengibaran Bendera Merah Putih pada pelaksanaan Upacara Proklamasi Kemerdekaan RI. Sumber : voi.id



Bung Karno di depan ratusan orang yang menghadiri proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sumber : voi.id

Selanjutnya berdasarkan pasal IV, aturan peralihan, UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dilantik dan bertugas sejak 29 Agustus 1945.





REVOLUSI KEMERDEKAAN DAN KONSOLIDASI POLITIK

Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami masa-masa yang sulit dalam mempertahankan kemerdekaan yang lebih dikenal dengan masa-masa revolusi. Dalam masa revolusi ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan eksternal, yakni keinginan Belanda untuk menjadikan tanah jajahan kembali. Juga kondisi geopolitik akibat mulai berkembangnya perang dingin antara pihak Cina dan Rusia yang komunis dengan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis serta sekutu lainnya yang non komunis.

Sedangkan secara internal, disebabkan oleh perbedaan-perbedaan politik dan strategi dalam proses mempertahankan

kemerdekaan, serta persaingan untuk memerintah Indonesia dan menjadikan ideologi yang dibawanya menjadi warna dalam proses pemerintahan republik. Perbedaan-perbedaan itu mencakup diantaranya, antara yang tua dan muda, antara sipil dan militer, antara kelompok yang beraliran kiri, tengah dan kanan, antara strategi dengan cara diplomasi dan cara perang, antara yang kooperasi dan non-kooperasi.

Peristiwa-peristiwa politik yang signifikan terjadi pada fase ini antara lain, seperti perundingan dengan Belanda, invasi Belanda, masuknya sekutu ke Indonesia, beberapa pemberontakan dari dalam negeri dan juga perang dengan Singapura dan Malaysia. Semua terjadi pada masa Presiden Soekarno sampai dengan beliau berhenti tahun 1967. Semua proses yang terjadi semasa revolusi dan kepemimpinan Presiden Soekarno, dikategorikan sebagai proses konsolidasi politik dan bisa dideskripsikan dalam periode pemerintahan sebagai berikut :



Presiden Soekarno

Sumber : detik.com

PRESIDEN RI KE-1 : SOEKARNO (1945-1967)

Masa pemerintahan Presiden Soekarno bisa dibagi dalam 3 periode, sampai dengan tahun 1956 didampingi oleh Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Periode pertama, periode revolusi dan demokrasi parlementer dengan Lembaga KNIP (1945-1955). Periode kedua, demokrasi parlementer dengan badan konstituante hasil pemilu (1955-1959). Selanjutnya

periode ketiga, demokrasi terpimpin (1959 -1967).

Selama periode revolusi, Perdana Menteri yang menjabat beserta peristiwa politik yang mengikutinya bisa dijelaskan sebagai berikut :

Sutan Sjahrir

(14 November 1945 - 3 Juli 1947)

Dari Partai Sosialis menjabat selama 1 tahun 9 bulan.

Pasca kekalahan Jepang, pasukan sekutu datang ke Indonesia untuk menerima penyerahan diri Jepang serta membebaskan tawan-tawanan perang, namun sebelumnya telah terjadi Perjanjian Civil Affairs Agreement pada 24 Agustus 1945, antara Belanda dan Inggris yang mengatur pemindahan kekuasaan di Indonesia dari British Military Administration kepada Nederlandsch Indische Civiele Administratie (NICA). Sehingga kedatangan pasukan sekutu diboncengi oleh Belanda melalui NICA yang ingin menjajah kembali Indonesia.

Diilhami oleh semangat mempertahankan kemerdekaan, terjadilah pertempuran melawan sekutu dan NICA di banyak tempat, seperti : 1) Pertempuran Ambarawa 20 Oktober 1945 dipimpin Kol. Sudirman, 2) Pertempuran Surabaya 10 November 1945 di pimpin Bung Tomo, 3) Pertempuran Bandung Lautan Api 13 Oktober 1945, 4) Pertempuran Medan

Area 13 Oktober 1945, 5) Pertempuran Puputan Margarana 20 November 1946 dipimpin I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran-pertempuran itu membuktikan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia didukung oleh rakyat sepenuhnya.

Diantara pertempuran-pertempuran diatas, yang paling fenomenal adalah Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Dalam pertempuran itu Brigjen Mallaby, jenderal sekutu tewas oleh pasukan Indonesia. Pertempuran ini juga yang membuat sekutu berpikir ulang atas dukungannya kepada Belanda dan disisi lain juga Belanda menyadari bahwa telah salah menarik kesimpulan atas proklamasi kemerdekaan hanya didukung oleh sekelompok kecil elit republik.

Hampir dalam setiap pertempuran, sekutu minta kepada Presiden Soekarno dan pemimpin di Jakarta menahan serangan Pasukan Indonesia pada sekutu. Disinilah awal mula terjadi perbedaan pandangan antara pemimpin sipil dan tentara, sehingga kepercayaan terhadap pemimpin sipil mulai berkurang. Dan ditengah situasi banyaknya petempuran, Ibukota RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta dan seluruh jajaran disambut oleh Sultan HB IX, Paku alam VIII dan Jenderal Sudirman.

Karena banyaknya pertempuran dengan Belanda, selanjutnya terjadilah proses diplomasi. Perundingan pertama dengan Belanda adalah Perundingan Linggarjati 11-15 November 1946 disahkan 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini telah disepakati : 1) Pengakuan Belanda secara de facto atas keberadaan Negara Republik Indonesia meliputi Sumatra, Jawa dan Madura serta Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 2). Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat. 3). RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda.

Perjanjian ini disatu sisi merugikan Indonesia, karena wilayah yang diakui hanya Sumatra, Jawa dan Madura, sehingga diprotes oleh beberapa tokoh dan kelompok politik baik sipil maupun militer. Namun, perjanjian ini memberikan keuntungan diplomatik kepada Indonesia. Dengan adanya pengakuan kemerdekaan secara de facto oleh Belanda, akhirnya diikuti oleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara Arab, India, Australia dan juga Amerika serikat.

Amir Sjarifuddin (3 Juli 1947 - 29 Januari 1948)

Dari Partai Sosialis menjabat selama 5 bulan.

Ternyata Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati dan Belanda melakukan Agresi Militer, yang sekarang kita kenal sebagai Agresi Militer Belanda ke-1, berlangsung pada bulan Juli - Agustus 1947. Agresi ini mendapatkan reaksi negatif secara Internasional, bahkan oleh Inggris sekutu Belanda. Atas permintaan India dan Australia, masalah agresi ini akhirnya dimasukkan menjadi agenda Dewan Keamanan PBB dan PBB menyerukan agar konflik senjata dihentikan. PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat.

Melalui mediasi KTN, dilakukanlah Perundingan Renville dari tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Pihak Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dan pihak Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmodjo.

Dalam perundingan ini disepakati :

- 1) Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatra menjadi wilayah Indonesia. Disetujui garis demarkasi Van Mook yang memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah pendudukan Belanda.

2) Tentara Indonesia harus ditarik mundur dari daerah 2 kantongnya di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Perjanjian ini menimbulkan protes sehingga terciptalah mosi tidak percaya, yang mengakibatkan Kabinet Perdana Menteri Amir Sjarifuddin jatuh dan juga menjadi pemicu munculnya Pemberontakan Kartosuwiryo terhadap Pemerintah Indonesia, yang akhirnya membentuk gerakan Negara Islam Indonesia/ Darul Islam (NII/DI) tahun 1948 di wilayah Jawa Barat dan baru berhasil dihentikan setelah penangkapan Kartosuwiryo, yang selanjutnya di hukum mati pada tahun 1962.

Perdana Menteri Sjahrir dan Amir Sjarifuddin berasal dari Partai Sosialis yang beraliran kiri. Di belakang hari, Amir Sjarifuddin membentuk Front Demokratik Rakyat yang beraliran kiri juga, sehingga pasca pengangkatan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri, seluruh partai yang beraliran kiri menjadi oposisi.

Pada bulan Agustus 1948 Muso tiba dari Rusia. Muso adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri tahun 1926. Muso menganut pemikiran stalinisme, bahwa hanya boleh ada satu partai kelas buruh. Atas pengaruh Muso, akhirnya meleburlah partai-partai sayap kiri, seperti Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia,

Federasi Serikat Buruh Indonesia, Front Demokratik Rakyat menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dibawah kepemimpinan Muso. Ikut juga tokoh-tokoh muda seperti D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto dan Sudisman yang dikemudian hari menjadi tokoh kunci Pemberontakan PKI tahun 1965.

Mohammad Hatta (29 Januari 1948 - 6 September 1950)

Dari Independen menjabat selama 2 tahun 9 bulan.

Pemerintahan Perdana Menteri Moh. Hatta ingin mengurangi jumlah anggota tentara yang sangat besar, secara kasar diperkirakan sekitar 350.000 tentara regular dan 470.000 tentara non regular (Ricklef, 1981). Sehingga mulai timbul persaingan faksi-faksi tentara yang mengarah ke perang saudara yang khawatir akibat kebijakan rasionalisasi tersebut. Pada bulan September 1948 terjadilah pertempuran terbuka antara tentara yang pro-PKI dan pro-Pemerintah. Tentara pro-PKI terdesak dan akhirnya mundur ke Madiun. Gubernur Suryo adalah Gubernur pertama Jawa Timur yang dibunuh PKI di Ngawi.

Pada tanggal 18 September PKI berhasil merebut tempat-tempat strategis di Madiun, membunuh tokoh-tokoh pro-Pemerintah dan mengumumkan melalui radio bahwa suatu

Pemerintahan Front Nasional yang baru telah terbentuk. Pada tanggal 19 September Presiden Soekarno mengancam para pemberontak Madiun melalui radio dan menghimbau Bangsa Indonesia agar bergabung dengan Presiden Soekarno dan Moh. Hatta daripada Muso dengan rencananya membentuk pemerintahan gaya Uni Soviet. Muso kemudian menjawab melalui radio Madiun bahwa dia akan berperang sampai titik darah penghabisan (Ricklef 1981, hal 481). Peristiwa ini di kemudian hari kita kenal sebagai Pemberontakan PKI Madiun 1948. Peristiwa pemberontakan ini menelan korban nyawa 10.000 lebih. Namun pemberontakan ini akhirnya bisa dikalahkan oleh pasukan pro-Pemerintah pimpinan Nasution dan Muso ditembak mati di Ponorogo pada 31 Oktober 1948.

Peristiwa ini semakin meyakinkan Amerika, bahwa kekuatan anti komunis di Indonesia cukup besar dan pilihan dukungan politik Amerika untuk Indonesia di forum PBB semakin terbuka.

Di sisi lain, Belanda melanggar Perjanjian Renville dengan melakukan Agresi Militer ke-2 dengan menyerang Indonesia dan menduduki Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Para Pemimpin Indonesia, terutama Presiden Soekarno dan Moh. Hatta mengambil strategi dengan membiarkan diri untuk ditangkap Belanda, sebagai bentuk perlawanan

diplomatik, untuk menunjukkan kepada dunia internasional kebrutalan Agresi Militer Belanda. Sebelumnya sudah dibentuk pemerintahan sementara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi dengan dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara, sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan.

Pada saat yang bersamaan, Komisi Tiga Negara (Australia, Belgia dan Amerika Serikat) sedang mengadakan pertemuan di Kaliurang, sehingga bisa menyaksikan secara langsung kebrutalan Belanda dalam Agresi Militer yang ke-2. Reaksi internasional mengecam tindakan Belanda, bahkan Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan dana ke Belanda. PBB juga menyerukan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan perundingan perdamaian.

Pada tanggal 1 Maret 1949 Tentara Indonesia dibawah pimpinan Letkol. Soeharto melakukan serangan mendadak dan berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa Tentara Indonesia masih solid dan mampu melakukan perlawanan dan mengalahkan Belanda. Peristiwa ini nanti menjadi salah satu peristiwa penting Soeharto, selain penumpasan pemberontakan PKI 1965 yang pada akhirnya, membawanya

menjadi Pemimpin republik pasca Presiden Soekarno diberhentikan sebagai Presiden.

Selanjutnya, Belanda dan Indonesia kembali ke meja perundingan. Lebih dikenal dengan Perundingan Roem-Royen pada 7 Mei 1949. Dalam perundingan ini menyepakati :

- 1) Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.
- 2) Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai Republik sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan memperluas negara atau daerah yang merugikan republik.
- 3) Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat, berusaha sungguh-sungguh menjalankan Konferensi Meja Bundar (KMB) setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta

Kemudian Indonesia juga harus melaksanakan

- 1) Sesuai resolusi DK PBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya menghentikan perang gerilya,
- 2) Bekerja sama mengembalikan perdamaian, menjaga ketertiban dan keamanan, 3) Turut serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda, untuk pembentukan Negara Indonesia Serikat.

Sebelum melakukan KMB, didahului dengan diselenggarakan Konferensi Inter Indonesia, yang diselenggarakan dua kali, 19 - 22 Juli 1949 di Yogyakarta dipimpin Perdana Menteri Moh. Hatta dan 30 Juli 1949 di Jakarta dipimpin Mr. Sultan Hamid II. Konferensi ini menyepakati :

- 1) Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.
- 2) Negara Indonesia Serikat yang disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat, dengan Bendera Merah Putih sebagai Bendera Kebangsaan dan Lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.
- 3) RIS akan diketuai oleh Presiden Konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Akan dibentuk 2 (dua) badan perwakilan, yakni sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian.
- 5) Pemerintah Federal akan menerima kedaulatan dari Pihak Belanda dan Republik Indonesia.
- 6) Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah Angkatan Perang Nasional.
- 7) TNI adalah inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia dalam KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda, dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut.

8) Pertahanan Negara adalah Hak Pemerintah RIS dan negara-negara bagian tidak mempunyai Angkatan Perang sendiri.

Selanjutnya diselenggarakan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 di Belanda, dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari Pemerintah Kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat.
- 2) Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu dan atas dasar pada ketentuan-ketentuan konstitusinya, rancangan konsitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Netherlands.
- 3) Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
- 4) Didalamnya ditambahkan beberapa catatan : Untuk Papua Barat akan dibicarakan secara khusus dan diselesaikan dalam 1 tahun.
- 5) Dibentuknya persekutuan Belanda - Indonesia dengan pimpinan Kerajaan Belanda sebagai Kepala Negara.
- 6) Pengambil alihan hutang Hindia Belanda sebesar 4.100.000 golden oleh RIS.

Pjs. Susanto Tirto Prodjo
(20 Desember 1949 - 21 Januari 1950)
Dari PNI menjabat selama 2 bulan (Masa Transisi).

Abdul Halim
(21 Januari 1950 - 6 September 1950)

Dari Independen menjabat selama 9 bulan

Ada tiga pemberontakan terjadi pada masa ini : 1) APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung 23 Januari 1950 dipimpin oleh Westerling. 2) Andi Azis pada 5 April 1950 di Sulawesi Selatan. 3) Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950 di Maluku dipimpin oleh Dr. Sumoukil. Ketiga-tiganya lebih diwarnai situasi kedaerahan (negara federal) akibat dari berlakunya Perjanjian KMB dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat. Disisi lain, terjadi banyak gejolak penolakan di daerah karena terbentuknya RIS.

MOSI INTEGRAL NATSIR

Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, Moh. Natsir Ketua Fraksi Masyumi mengajukan "Mosi Integral" di Parlemen RIS. Mosi ini bertujuan untuk menyatukan kembali dan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi ini mendapat dukungan luas dan ditandatangani oleh seluruh fraksi di DPR-RIS. Pada tanggal



Muhammad Natsir

Sumber : republika.id

19 Mei 1950 diadakan forum kenegaraan yang dihadiri seluruh negara bagian dan menghasilkan piagam persetujuan yang menyepakati pembentukan sebuah negara kesatuan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Kemudian Presiden Soekarno membubarkan RIS dan pada tanggal 17 Agustus

1950, Republik Indonesia resmi kembali diproklamasikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Hatta menyebutkan Mosi Integral Natsir adalah proklamasi yang ke-2 diumumkan 17 Agustus 1950, setelah proklamasi 17 Agustus 1945.

1) Mohammad Natsir (6 September 1950 - 21 April 1951)

Partai Masyumi menjabat selama 7 bulan. Kabinet Natsir jatuh karena gagal dalam menyelesaikan Irian Barat untuk menjadi bagian RI.

2) Sukiman Wirjosanjoyo (26 April 1951 - 1 April 1952)

Partai Masyumi menjabat selama 1 tahun. Kabinet ini jatuh karena gagal dalam perundingan untuk memasukkan Irian Barat menjadi wilayah RI.

3) Wilopo (1 April 1952 - 30 Juli 1953) dari PNI menjabat selama 1 tahun 2 bulan

4) Akibat Peristiwa Tanjung Morawa, Serikat Tani Indonesia mengajukan mosi tidak percaya dan Kabinet Wilopo jatuh. Peristiwa ini adalah penolakan atas kebijakan pengalihan pengelolaan tanah di Tanjung Morawa yang menjadi Program Kabinet Wilopo.

5) Ali Sastroamidjojo (1 Agustus 1953 - 12 Agustus 1955) dari PNI menjabat selama 2 tahun.

Kabinet Ali jatuh disebabkan oleh 2 (dua) hal yakni faktor ekonomi dan politik. Setelah kabinet ini dilantik, Menteri Pertahanan dijabat oleh Iwa Kusumasumatri yang beraliran kiri. Iwa sering mengangkat pejabat Angkatan Darat yang setia kepadanya tanpa berkoordinasi dengan KSAD. Situasi ini membuat TNI AD menjadi terbelah dan kemudian dilakukan rekonsiliasi di Yogyakarta. Kebijakan-kebijakan ini dianggap sebagai campur tangan pada TNI AD dan terjadilah aksi boikot pada 27 Juni 1955.

6) Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956) Dari Masyumi menjabat selama 8 bulan (Terjadi Pemilu tahun 1955).

Pada masa kabinet ini diadakan pemilu pertama sejak Indonesia Merdeka. Pemilu ini menunjukkan 4 partai politik besar, yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI. Pemilu ini memiliki dua makna penting, secara internal akan membantu proses stabilisasi politik dalam negeri, sedang secara internasional pemilu ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa melaksanakan demokrasi sebagai proses politik berbangsa dan bernegara yang modern.

Moh. Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956 dan sejak itu Indonesia tidak memiliki Wakil Presiden sampai tahun 1973. Pengunduran diri ini akibat Bung Hatta berbeda pandangan atas langkah politik Presiden Soekarno. Salah satunya, mengikutkan Partai Komunis Indonesia dalam format kabinet. Dan ini menjadi awal PKI memasuki kembali wilayah pemerintahan pasca Pemberontakan Madiun 1948 dan nanti akhirnya menjadi kekuatan politik yang dominan dalam tahun 1960, sampai terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang disponsori oleh PKI.

7) Ali Sastroamidjojo (24 Maret 1956 - 9 April 1957)

Dari PNI menjabat selama 11 bulan.

Kabinet Ali yang kedua jatuh karena kegagalan menjalankan Amanat Konferensi Meja Bundar dalam menyelesaikan Irian barat untuk menjadi bagian dari RI.

8) Djuanda Kartawidjaja (9 April 1957 - 6 Juli 1959)

dari Independen menjabat selama 15 bulan.

Pada masa Perdana Menteri Juanda, terjadi dua pemberontakan yakni, PRRI di Sumatra dan PERMESTA di Sulawesi pada tanggal 15 Februari 1958. Dua pemberontakan ini intinya disebabkan oleh dua hal : 1) Akibat pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden Soekarno pro-komunis, 2). Tuntutan akan otonomi daerah yang lebih luas dan kekecewaan kebijakan di Angkatan Darat. Baik PRRI maupun PERMESTA, menyatakan bahwa gerakan mereka adalah gerakan deklarasi politik untuk memperjuangkan Indonesia dan bukan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun akhirnya gerakan ini berhasil ditumpas dan Pada tahun 1960 Partai Masyumi dan PSI dibubarkan Presiden Soekarno atas pertimbangan Mahkamah Agung melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 201 tahun 1960, mengacu pada Penetapan Presiden No.7/1959 karena keterlibatannya dalam gerakan PRRI dan PERMESTA.

DEKRIT PRESIDEN, 5 JULI 1959

Pada sisi yang lain, sebagai akibat dari berlarut-larut dan gagalnya konstituante dalam menyusun undang undang dasar sebagai pengganti UUDS 1950, Jenderal Nasution sebagai anggota Dewan Nasional mengusulkan agar Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, nanti lebih kita kenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berisi antara lain : 1) Menetapkan pembubaran konstituante, 2) Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi UUDS 1950, 3) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Golongan dari daerah. Dengan berlakunya dekrit ini, maka berlakulah demokrasi terpimpin dengan Presiden Soekarno sebagai Presiden sekaligus sebagai Perdana Menteri.

Dalam kurun rentang waktu 13 tahun 11 bulan pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia diperintah oleh 12 Perdana Menteri dan 19 kali pergantian kabinet. Dengan satu pasangan presiden dan wakil presiden yakni Soekarno dan Hatta sebagai figur "reserve and guarantee". Untuk situasi sosial dan politik saat itu, model pemerintahan seperti demokrasi parlementer ini paling tepat untuk kondisi saat itu, masa-masa konsolidasi politik.

Dimana salah satu ukuran keberhasilan signifikan pemerintahan adalah politik. Salah satunya adalah perjanjian hasil negosiasi dengan Belanda, terbukti beberapa kabinet jatuh akibat dari “kekalahan perundingan”. Perdana Menteri Sjahrir jatuh setelah Perjanjian Linggarjati, Perdana Menteri Amir Sjarifuddin jatuh oleh Perjanjian Renville, Perdana Menteri Moh. Hatta setelah Konferensi Meja Bundar, kegagalan dalam masalah Irian Barat menjatuhkan Kabinet Natsir, Skandal Angkatan Darat menimpa Kabinet Ali Sastroamidjojo 1.

Didalam semua perjanjian memang secara kasat mata merugikan Indonesia. Dalam Perjanjian Linggarjati misalnya, pengakuan Kedaulatan RI hanya berlaku untuk Sumatra, Jawa dan Madura. Bahkan dalam Perjanjian Renville, berkurang lagi menjadi hanya Sumatra, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ditambah lagi dengan adanya Garis Demarkasi Van Mook, yang mengharuskan tentara republik untuk pergi dari wilayah-wilayah yang tidak masuk Wilayah Indonesia. Di dalam KMB, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Namun kegagalan-kegagalan itu, tidak sampai menciptakan ketidakpercayaan kepada Presiden Soekarno. Nanti akan terlihat ketika demokrasi dipimpin dimana Presiden Soekarno menjadi “kepala eksekutif” langsung dalam mengelola pemerintahan.

Dari sini juga muncul perbedaan-perbedaan politik antara tentara dan sipil tentang demokrasi yang cocok diterapkan di Indonesia dan peran tentara dalam politik yang nanti memunculkan ide “jalan tengah” dari Jenderal Nasution, yang mengilhami Konsep Dwifungsi ABRI yang diterapkan Presiden Soeharto selama Orde Baru. Dan bersamaan dengan itu, tentara mulai memasuki wilayah administratif, keuangan, politik dan bisnis dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer oleh Presiden Soekarno.

PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN

1) Soekarno (9 Juli 1959 - 25 Juli 1967)

Dari Independen menjabat selama 7 tahun.

“Menjelang pertengahan tahun 1958, ketika pengambilalihan Perusahaan Belanda telah dirampungkan dan pemberontakan PRRI telah menurun menjadi kegiatan gerilya, maka jalan itu telah bebas dari rintangan untuk terjadinya sebuah tatanan politik yang baru. Presiden Soekarno dan Angkatan Darat bersama-sama telah menghimpun kekuatan cukup untuk menegakkan suatu alternatif lain dari demokrasi konstitusional. Alternatif itu

apabila kita pakai istilah yang menjadi lambang pemerintah adalah Demokrasi Terpimpin (Herbert Feith 1963. Terj. Hal 26).

Pada tahun 1960, akibat penolakan parlemen hasil konstituante terhadap RAPBN yang diajukan, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Dan kemudian membuat DPRS dan MPRS baru, yang terdiri dari wakil-wakil partai politik, utusan golongan dan utusan daerah. Menurut Keppres No. 199 tahun 1960, jumlah anggota MPRS adalah sebanyak 616 orang, terdiri dari 257 Anggota DPR GR, 241 utusan Golongan Karya, yang nantinya pada Masa Orde Baru menjadi kekuatan politik dominan dan 116 utusan daerah yang ke semua anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Golongan Karya terdiri dari Angkatan Bersenjata, Tani, Buruh, Alim Ulama perwakilan Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Wanita, Cendekiawan/Pendidik, Koperasi, Pengusaha Nasional, Angkatan 45, Veteran, Seniman, Wartawan dan Pemuda. Golongan Karya ini nanti dengan makna yang berbeda di Era Orde Baru dilembagakan oleh tentara menjadi institusi politik yang ikut dalam pemilu tahun 1971.

Pada tahun 1961 pemerintah hanya mengakui sembilan partai politik, yaitu PKI, Partai Murba, PNI, IPKI, Perti,

Perkindo, PSII, Partai Katolik dan NU. Partai-partai inilah yang memiliki perwakilan di DPR, yang kemudian dirangkum dalam Konsep Ideologis Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis). Bahkan konsep Nasakom ini dimasukkan dalam Panca Azimat Revolusinya Bung Karno, yakni : 1) Nasakom (Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme) yang sudah ada sejak tahun 1926, 2) Pancasila yang lahir 1945, 3) Manipol/USDEK yang lahir tahun 1959, 4). Trisakti (Berdaulat dibidang Politik, Ekonomi dan Budaya), 5). Berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) 1965.

Konsep Nasakom inilah yang ditentang oleh partai-partai politik dan golongan-golongan, dan akhirnya berafiliasi dengan Tentara yang sudah mulai memasuki wilayah politik dan terjadilah segitiga kekuatan politik yaitu Presiden Soekarno, Tentara (AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibat dari konsep Nasakom, PKI mendapatkan peran yang lebih besar dalam Panggung Politik Nasional. Dalam banyak kesempatan, Presiden Soekarno sering menyampaikan bahwa yang menolak Nasakom berarti menolak Pancasila, sehingga PKI seperti menjadi Anak Emas Revolusi.

Diantara tiga kekuatan tersebut, ada PNI yang bersaing dengan PKI dalam memperebutkan segmen massa dibawah dan pengaruh dari Presiden Soekarno, yang nanti

akan pecah menjadi dua, yang pro-Soekarno dan anti-Soekarno. Kemudian ada Nahdlatul Ulama, Masyumi yang sudah dibubarkan pemerintah, Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai Murba, yang nantinya semua berafiliasi dengan Angkatan Darat dan golongan-golongan lain, berdiri di front yang berbeda berlawanan dengan PKI.

Selama demokrasi terpimpin terjadi berberapa kali peristiwa politik dan dalam setiap peristiwa tersebut, terjadi tarik-menarik antara tiga kekuatan politik dan afiliasinya. Presiden Soekarno sebagai porosnya, kemudian Angkatan darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai front yang saling berlawanan dan titik temunya di Presiden Soekarno.

2) Operasi Trikora 1961 - 1962

Menurut Perjanjian KMB, Belanda akan menyelesaikan untuk penggabungan Papua dengan Republik Indonesia dalam waktu 1 tahun, Namun Belanda kembali mengingkari perjanjian dan akan membentuk negara sendiri untuk Papua. Upaya-upaya diplomatik telah dilakukan dan gagal, sehingga pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda tahun 1960. Maka dibentuklah Operasi Trikora yang berisi : 1) Gagalakan pembentukan negara Boneka Papua buatan Belanda, 2) Pengibaran Bendera

Merah Putih di Irian Barat, 3) Mempersiapkan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Secara militer, dibentuklah Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto dan terjadilah pertempuran laut aru tahun 1962, yang mengakibatkan tenggelamnya KRI Macan Tutul dan gugurnya Komodor Yos Sudarso. Selanjutnya terjadilah perundingan di New York pada tanggal 15 Agustus 1962, yang isinya adalah penyerahan Irian Barat ke United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang kemudian diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 dan kemudian dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli - 2 Agustus 1969. Pada akhirnya Rakyat Papua memutuskan bergabung dan kembali menyatu dengan NKRI.

3) Dwikora 1963 - 1966

Pada tahun 1960 Federasi Malaya ingin menggabungkan Wilayah Malaya, Brunei, Serawak, Sabah dan Singapura yang didukung oleh Inggris. Presiden Soekarno menentang rencana itu, karena bertentangan dengan Persetujuan Manila. Namun pada tanggal 16 September 1963 Federasi Malaya, Sabah, Serawak dan Singapura mengumumkan terbentuknya Negara Malaysia. Akhirnya pada tahun 1964 "Ganyang Malaysia" benar-benar dijalankan dan Presiden

Soekarno mengeluarkan Perintah Operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang berisi : 1) Perkuat Ketahanan Revolusi Indonesia, 2). Bantu Perjuangan Revolusioner Rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei untuk melawan kolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Sebagai efek dari Operasi Dwikora, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 1 Januari 1965.

Disaat yang bersamaan, persaingan politik dalam negeri masih terus berjalan antara PKI dan Tentara. Dalam rangka mendukung Operasi Dwikora dan Implementasi Nasakom, PKI mengusulkan dibentuknya Angkatan ke-5 (lima), yang terdiri dari buruh dan petani yang dipersenjatai. Sebelumnya tentara terdiri dari 4 (Empat) Angkatan yakni, AD, AL, AU dan Kepolisian. Akhirnya usul ini ditolak oleh Angkatan Darat. Dengan kemampuan politik PKI untuk selalu menjadi "free rider" atas kebijakan Presiden Soekarno sejak diterapkannya Demokrasi Terpimpin, membuat PKI semakin memiliki pengaruh politik yang besar karena Konsep Nasakom, PKI merasa mendapatkan dukungan dari Presiden Soekarno.

Disisi yang lain diakhir tahun 1964 dan awal 1965, ribuan anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) bergerak merampas tanah di Jawa dengan dasar Undang-Undang No. 5 tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, sehingga terjadi bentrok dengan pemilik tanah dan polisi. Hal ini juga menciptakan rasa takut yang meluas di kalangan masyarakat, sehingga “karena alasan-alasan ini semua maka setelah Presiden Soekarno tidak ada, kemungkinan PKI akan mengalami masa yang sukar, tentara akan muncul sebagai kekuatan politik yang dominan dan akan memperlakukan PKI sebagai musuh” (Herbetg Feith, 1963. Terj. Hal 149).

Persaingan ini memuncak dan terjadilah Peristiwa Gerakan 30 September 1965 PKI (G30SPKI). Dimana terjadi penculikan dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat yang dilakukan oleh pasukan yang loyal pada PKI yakni Pasukan Cakrabirawa pimpinan Letkol. Untung pada tanggal 1 Oktober 1965. Akibatnya tujuh Jenderal menjadi korban, yakni :

1. **Letjen. Ahmad Yani** (Menteri/Panglima AD/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi).
2. **Mayjen. Raden Suprpto** (Deputi II Menteri/Panglima AD Bidang Administrasi).
3. **Mayjen. Mas Tirtodarmo Haryono** (Deputi III Menteri/Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan).
4. **Mayjen. Siswondo Parman** (Asisten I Menteri/Panglima Bidang Intelijen)

5. **Brigjen. Donald Isaac Panjaitan** (Asisten IV Menteri/Panglima AD Bidang Logistik).
6. **Brigjen. Sutoyo Siswomiharjo** (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal AD)
7. **Lettu. Pierre Andreas Tendean** (Ajudan Jenderal TNI AH Nasution). Sedangkan Jenderal AH Nasution berhasil lolos dari pembunuhan ini, namun putri beliau Ade Irma Suryani Nasution menjadi korban dalam peristiwa ini.

Gerakan PKI ini juga berlangsung di Solo dan Yogyakarta, dengan korban penculikan dan pembunuhan PKI yakni Brigjen. Katamso dan Kol. Sugiono. Pasca pembunuhan Perwira TNI AD, PKI mampu menguasai 2 (dua) sarana komunikasi vital yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telkom di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para Perwira Tinggi Anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung.

Oleh karena Menteri/Panglima AD tidak ada, maka Mayjen Soeharto sebagai Panglima Kostrad mengambil prakarsa untuk segera bertindak dan berusaha memulihkan keamanan dan ketertiban. Pada malam hari setelah

peristiwa penculikan, Mayjen Soeharto telah berhasil menguasai pusat ibukota dan melalui RRI, Mayjen Soeharto berpidato menjelaskan kejadian-kejadian di ibukota dengan penegasan bahwa situasi telah dikuasai. Keesokan harinya Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma berhasil direbut oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Pada tanggal 2 Oktober 1965, Mayjen Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban oleh Presiden Soekarno.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, mayat para Jenderal yang dibunuh ditemukan di Lubang Buaya dekat Halim. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 1965, Soeharto diangkat menjadi Menteri/ Panglima AD.

Peristiwa ini sampai beberapa bulan kemudian telah menimbulkan gelombang ketidakpercayaan kepada PKI, terjadi aksi-aksi massa yang menuntut pembubaran PKI, keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu. Gelombang gerakan anti-PKI telah menjalar ke seluruh pelosok negeri, juga terjadi pengejaran-pengejaran, kekerasan dan pembunuhan terhadap aktivis PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Bahkan aksi-aksi disinyalir bisa menurunkan kewibawaan Presiden Soekarno. "Proses pemulihan keamanan dan ketertiban ternyata mengalami hambatan, khususnya pada aspek politisnya, justru karena sikap Presiden Soekarno sendiri. Presiden Soekarno

ternyata belum juga mau meninggalkan praktek-praktek inkonstitusional dan mendukung PKI. Karena sikap itu berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat, maka kewibawaan Presiden Soekarno dengan cepat merosot, sehingga timbul krisis kepemimpinan nasional, yang terungkap secara tajam dengan berkobarnya aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni gelombang demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang didukung oleh rakyat. (Sartono Kartodireja 1973, Vol. VI hal. 124). Tritura terdiri dari : 1) Bubarkan PKI, 2). Retool Kabinet, 3). Turunkan harga-harga.

“Soekarno tetap berusaha memegang panggung pusat, tetapi magis lamanya tidak mampu berfungsi lagi. Pada Bulan Januari 1966, dia berpidato didepan radio menyerukan semua rakyat untuk mengikutinya, sementara Soebandrio menyerukan pembentukan Barisan Soekarno. Soeharto mengimbangi seruan Soebandrio dengan berikrar bahwa dia tetap setia kepada Presiden Soekarno dan meminta kepada semua pendukung setia Presiden untuk mendukung tentara (Richlef 1981, Hal. 597). Dan setelah itu, Presiden Soekarno masih terus mencoba menghidupkan Demokrasi Terpimpin. Terakhir, pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden merombak kabinet. Presiden memberhentikan Jenderal AH Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan menghapus Kepala Staf Angkatan

Bersenjata, sedangkan Omar Dhani dan Soebandrio tetap dipertahankan. Presiden juga menunjuk Letkol Imam Sjafei sebagai Menteri Negara Urusan Keamanan. Namun langkah ini, malah menyulut demonstrasi dan kekerasan di Jakarta, mendesak agar Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto untuk memulihkan ketertiban.

Situasi yang tidak stabil masih terjadi, demonstrasi masih terjadi dimana-mana. Pada Bulan Februari dan Maret 1966, Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang mengadili Njono Prawiro bekas Sekjen SOBSI organisasi buruh underbow PKI dan Letkol Untung di vonis bersalah dan di hukum mati atas keterlibatannya dalam Peristiwa G 30 S. Sehingga demonstrasi mahasiswa, pelajar dan rakyat yang menuntut pembubaran dan pelarangan PKI semakin memiliki argumentasi dan alasan hukum.

Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang diberikan kepada Jenderal Soeharto, berisi : 1) Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan/ Presiden/ Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan

melaksanakan dengan pasti segala Ajaran Pemimpin Revolusi, 2) Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya, 3) Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.

“Dengan mengambil kata kiasan Semar, dewa badut yang paling tangguh dalam Wayang Jawa, dokumen ini disebut Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), (Richlef, 1981, hal 598). Dan kemudian pada tanggal 21 Juni 1966, MPRS menetapkan Supersemar menjadi Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, sehingga surat perintah tersebut tidak bisa dicabut Presiden. Dengan Supersemar ini menjadi titik pangkal lahirnya rezim baru dalam Politik Indonesia, yakni Orde Baru.

Pada tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang isinya membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta organisasi underbow yang berlindung dibawah PKI. Selain itu, Keppres tersebut juga menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya Keppres ini diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. XXV/1966. Pada tanggal 5 Juli 1966 MPRS mencabut mandat Soekarno

sebagai Presiden Seumur Hidup dan pada tanggal 12 Maret 1967, Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Dalam ketetapan MPRS ini, nama Presiden Soekarno disebutkan secara khusus pada pasal 6 berbunyi :

“Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya pada Pejabat Presiden”.

Sementara itu, Soeharto ditetapkan secara resmi menjadi Presiden melalui TAP MPRS No. XLIV pada tanggal 12 Maret 1967, dengan untuk melaksanakan tugas-tugas presiden sampai terpilihnya MPR hasil pemilu.

Dalam periode ini, Presiden Soekarno sekaligus Perdana Menteri memimpin langsung kekuasaan eksekutif. Pada masa ini, tercatat terjadi 9 kali pergantian kabinet yakni :

1. Kerja I, 10 Juli 1959 - 18 Februari 1960, 33 personel
2. Kerja II, 18 Februari 1960 - 6 Maret 1962, 40 personel
3. Kerja III, 6 Maret 1962 - 13 November 1963, 60 personel

4. Kerja IV, 13 November 1963 - 27 Agustus 1964, 66 personel
 5. Dwikora I, 27 Agustus 1964 - 22 Februari 1966, 110 personel
 6. Dwikora II, 24 Februari 1966 - 28 Maret 1966, 132 personel
 7. Dwikora III, 28 Maret 1966 - 25 Juli 1966, 79 personel
 8. Ampera I, 25 Juli 1966 - 17 Oktober 1967, 31 personel
 9. Ampera II, 17 Oktober 1967 - 6 Juni 1968, 24 personel
- (Sumber : Daftar Kabinet di Indonesia. www.fahum.umsu.ac.id)

Dalam durasi waktu sekitar 7 tahun kepemimpinan Presiden Soekarno langsung sebagai pemimpin eksekutif, telah terjadi 9 kali perubahan kabinet dan kalau dilihat lebih jauh dari komposisi jumlah menteri, perubahan-perubahan tersebut nampak cukup signifikan. Proses konsolidasi politik masih menjadi agenda utama, dibandingkan proses pembangunan ekonomi. Akhirnya, dampak kegagalan pemerintah ini langsung dialamatkan kepada Presiden Soekarno.

Selain itu, selama Periode Demokrasi Terpimpin ini, juga terjadi beberapa hal yang menyimpang dari Konstitusi UUD 1945 seperti : 1) Pangangkatan Presiden Soekarno seumur hidup oleh MPRS pada tahun 1963, 2) Presiden Soekarno

mengambil alih kekuasaan legislatif dengan menetapkan UU No.19/1960 tentang Pemilihan Umum, melanggar pasal 19 dan 20 UUD 1945, 3) Penggunaan kekuasaan presiden secara absolut dimana bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan.

Dengan jatuhnya Presiden Soekarno dan bubarnya Partai Komunis Indonesia (PKI), maka Tentara (Angkatan Darat) menjadi satu-satunya kekuatan politik yang efektif dan dominan yang tersisa, yang kemudian bertekad untuk melaksanakan koreksi total atas penyimpangan Demokrasi Terpimpin dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto.



Presiden Soeharto

Sumber : detik.com

PRESIDEN RI KE-2 : SOEHARTO (1967-1998)

"Pertengahan dasawarsa 60-an adalah masa suram bagi perekonomian Indonesia. Tingkat produksi dan investasi diberbagai sektor utama menunjukkan kemunduran sejak tahun 1950, pendapatan riil perkapita dalam tahun 1966 sangat mungkin lebih rendah dari pada tahun 1938. Sektor industri yang menyumbangkan hanya sekitar 10 persen dari

GDP dihadapkan pada masalah pengangguran kapasitas yang serius. Diawal dasawarsa tersebut, defisit anggaran belanja negara mencapai 50 persen dari pengeluaran total negara, penerimaan sangat menurun dan selama tahun 1964 - 1966 hiperinflasi melanda negeri ini dengan akibat lumpuhnya perekonomian. (Anne Booth dan Peter McCawley 1981, LP3ES, Hal 1). Dari tulisan Anne Booth ini, nampak sekali ada persoalan ekonomi yang serius selama penerapan demokrasi terpimpin.

Pasca ditetapkan sebagai presiden, Soeharto melakukan tindakan politik dan ekonomi jangka pendek sebagai bentuk koreksi atas pemerintahan sebelumnya. Antara lain : 1) Menormalisasi hubungan dengan Malaysia melalui Persetujuan Bangkok, yang ditindaklanjuti dengan persetujuan normalisasi hubungan Malaysia - Indonesia pada 11 Agustus 1966, 2) Membuka kembali pergaulan dengan dunia internasional, dengan masuk menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, 3) Melakukan negosiasi pembayaran hutang, baik dengan blok timur seperti Rusia dan blok barat, sampai dengan terbentuknya IGGI pada tahun 1967, 4) Membuka kesempatan investasi asing dengan disahkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Investasi, 5) Memutus hubungan diplomatik dengan RRC dan melakukan pembatasan pada Warga Cina dan Keturunan

Cina, 6) Menyelenggarakan Pepera untuk Papua Barat. 14 Juli - 2 Agustus 1969 dengan Keputusan Papua bergabung dengan Indonesia dan hasilnya diterima dan disahkan PBB dengan Resolusi Majelis Umum PBB 2504 tahun 1969.

Selain itu, untuk langkah jangka panjang pada masa awal kepemimpinannya, Presiden Soeharto menerapkan 2 (dua) langkah utama dilakukan untuk menyelesaikan masalah politik dan ekonomi. Untuk langkah-langkah politik, tentara adalah kekuatan utama Presiden Soeharto dan nanti akan ditunjuk orang-orang yang menjadi lingkaran inti Aspri Presiden, yang membantu Soeharto menyusun konsep dan melakukan pengendalian politik antara lain Mayjen Ali Moertopo (Operasi Khusus dan Intelijen), Mayjen Soedjono Hoemardani (Keuangan), Letjen Soerjo Wirjohadipoetro, Mayjen Tjokropranolo. Dalam bidang politik nantinya diwarnai Ideologisasi Pancasila dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, penyederhanaan partai politik dan depolitisasi masyarakat, institusionalisasi dwifungsi ABRI, tentara menempati jabatan-jabatan sipil baik di pemerintahan maupun di BUMN seperti yang terjadi sebelumnya, serta kerjasama bisnis dengan para "cukong" untuk pengamanan politik penguasa. Terobosan utama dalam bidang politik adalah diselenggarakannya Pemilu sejak tahun 1971 dan rutin setiap lima tahun sekali sebagai

landasan utama demokrasi, terlepas banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.

Di bidang ekonomi Presiden Soeharto merekrut tim ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia seperti Dr. Widjojo Nitisastro, Dr. Ali Wardhana, Dr. Emil Salim, Dr. Moh Sadli dan Dr. Subrata yang nanti lebih dikenal sebagai “Mafia Barkeley”, menambah yang sebelumnya sudah ada yakni Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo dan Drs. Radius Prawiro. Belakangan di tahun 1978 presiden memasukkan teknolog Dr. Habibie yang akan menjadi Menteri Riset dan Teknologi serta membawahi pengelolaan dan pengembangan industri strategis, yang nantinya menjadi lokomotif pengembangan teknologi di Indonesia.

Salah satu terobosan Orde Baru adalah dibuatnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan diterapkannya Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dalam mewujudkan program ekonomi pemerintah. Dalam Repelita inilah nanti dimasukkan program-program pembangunan yang difokuskan pada tiga hal, lebih dikenal dengan Trilogi Pembangunan yakni : Stabilitas Politik, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan, yang nanti diterjemahkan dalam program yang lebih spesifik, misalnya program swasembada pangan dan keluarga berencana.

IDEOLOGISASI PANCASILA

Berangkat dari pemikiran atas kegagalan konstituante, karena Partai-Partai Islam yang ingin memasukkan Piagam Jakarta ke dalam Konstitusi, pemberontakan PKI serta PNI yang menghendaki ditambahkannya Marhaenisme dalam Pancasila, maka Presiden Soeharto dan Orde Baru melakukan langkah-langkah Ideologisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga sesuai dengan pandangan pribadi Presiden Soeharto, seperti yang disampaikan David Jenkins : "Menurut seorang kolega militer, Soeharto berpendapat bahwa NU dan PNI tidak mengartikan Pancasila sebagaimana mestinya. Ia percaya NU menghendaki "Pancasila Plus" artinya Pancasila plus Piagam Jakarta. Soeharto memandang para pemimpin Islam masih menghendaki diberlakukannya Piagam Jakarta. Hal tersebut membuktikan mereka cenderung masih menginginkan didirikannya Suatu Negara Islam, sesuatu yang ditentang keras oleh ABRI. Menurut kelompok penguasa, Soeharto percaya PNI pun menghendaki "Pancasila Plus". Tuntutan mereka berupa Pancasila ditambah dengan Marhaenisme atau Pancasila plus Kerakyatan. Soekarno seringkali menekankan masalah ini, sebagaimana dicatat para pemimpin Orde Baru bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan sesuai

dengan kondisi Indonesia. Penekanan ini sama sekali tidak mereka terima." (*David Jenkins 2010, Hal 46*).

Ideologisasi nanti diterapkan dalam bentuk-bentuk peraturan yang bersifat pencegahan atas tumbuh dan berkembangnya Ideologi Marxisme dan Komunisme, deideologisasi islam politik dan operasi-operasi khusus yang didasarkan pada Umat Islam dan secara khusus memasukkan Pancasila menjadi dasar dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk undang-undang, juga program-program indoktrinasi dan pendalaman Pancasila dalam jenjang pendidikan dan pelatihan yang dijalankan Pemerintah.

ISU KEWARGANEGARAAN DAN HUBUNGAN DENGAN RRT (CINA)

Pasca pemberontakan PKI 1965, langkah-langkah pembatasan hubungan dengan RRT dilakukan dan juga pembatasan-pembatasan pada warga Keturunan Cina sebagai salah satu bentuk pencegahan menyebarnya Ideologi Komunisme dan Marxisme.

Pada tahun 1966, melalui Ketetapan MPRS No. 32 tahun 1966 dilakukan pelarangan penggunaan Aksara dan Bahasa Tionghoa untuk media massa dan nama Toko/Perusahaan.

Pada tahun yang sama, dikeluarkan kebijakan yang mengatur tentang proses penggantian “nama-nama perseorangan dan nama keluarga Cina bagi orang-orang Tionghoa.

Pada tahun 1967, pemerintah juga memutuskan hubungan diplomatik dengan RRT, kemudian penggunaan istilah “Tionghoa dan Tiongkok” diganti menjadi “Cina”, karena Identitas Tiongkok digunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun yang sama, diatur tentang kewajiban untuk melakukan proses asimilasi bagi Warga Keturunan Cina dan anjuran untuk penggantian nama-nama Cina sesuai aturan sebelumnya. Selain itu, sesuai Inpres No. 14 tahun 1967, juga dilakukan pembatasan Perayaan Imlek dan penyelenggaraan acara adat dimuka umum. Puncaknya pada tahun 1969 melalui UU No. 4 tahun 1969, Perjanjian mengenai kewarganegaraan ganda dengan RRT dinyatakan tidak berlaku lagi.

KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Kopkamtib dibentuk melalui 1). Keppres/Pangti ABRI/KOTI No. 142/KOTI/1965 tanggal 1 November 1965, 2). No. 162/KOTI/1965 tanggal 12 November 1965, 3). No. 179/KOTI/1965 tanggal 6 Desember 1965 yang ditandatangani

Presiden Soekarno, dengan tugas pokok untuk memulihkan keamanan dengan jalan Operasi Militer, Operasi Mental dan Operasi Politik. Selanjutnya institusi ini dilembagakan oleh Orde Baru, melalui Keppres No. 16 tahun 1969 tentang Pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto sampai dengan tahun 1988. Kemudian melalui Keppres No. 29 tahun 1988, Lembaga Kopkamtib diganti dengan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) dengan tugas mengkoordinasikan upaya departemen dan instansi dalam rangka pemulihan, pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan terhadap Ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Langkah awal yang dilakukan Kopkamtib adalah Operasi Militer, yakni operasi penumpasan G 30 S PKI yang dipimpin langsung oleh Jenderal Soeharto sebagai Pangkostrad, yang kemudian diangkat menjadi Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Secara khusus Operasi militer dilakukan untuk mengambil alih penguasaan tempat-tempat strategis seperti RRI, Bandara Halim serta memastikan keamanan dan keselamatan Presiden Soekarno serta keamanan Ibukota. Operasi ini akhirnya juga mengejar, menangkap dan mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan

G 30S PKI antara lain D.N Aidit, Letkol Untung, Syam Kamaruzaman, Njoto, Brigjen Suparjo, Kolonel Latif, Soebandrio, Marsekal Omar Dhani. Selanjutnya bersama dengan komponen rakyat yang lain, operasi ini menyebar ke seluruh Indonesia dan secara khusus di wilayah-wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, yang menjadi pusat perkembangan PKI. Terjadi pengejaran, penculikan dan pembunuhan terhadap aktivis PKI. Dalam peristiwa ini, diperkirakan sekitar 500.000 orang terbunuh. (Malcom Caldwell & Ernst Utrecht 1979:2011, Hal 263).

Selanjutnya operasi terus berlanjut, meliputi Operasi Merapi di Jawa Tengah (1965 - 1966) Operasi Trisula di Blitar Selatan, Jawa Timur (1968), Operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah - Jawa Timur dan Gerakan Operasi Teritorial yang dimulai bulan Oktober 1965 sampai akhir periode Orde Baru.

Termasuk dalam operasi ini adalah Program Pengasingan dan Pembuangan aktivis politik PKI yang terlibat G 30 S PKI ke Pulau Buru berdasarkan Keppres No. 16 tahun 1969. Diperkirakan sekitar 12.000-an orang dikirim ke Pulau Buru dalam rentang waktu 1968 - 1976. Kemudian juga diambil Keputusan penggolongan anggota PKI dan keterlibatan dengan G 30 S. Dibuat menjadi 3 klasifikasi yakni A, B, dan C. Klasifikasi A dan B diduga bersumber dari Keputusan

Kopkamtib yang tidak pernah dipublikasikan, sedangkan klasifikasi golongan C justru tertuang dalam Keppres No. 28 tahun 1975. Klasifikasi kurang lebih sebagai berikut :

Golongan A : Orang yang tertuduh terlibat langsung pada peristiwa G 30 S

Golongan B : Anggota PKI dan anggota yang diasosiasikan dengan PKI

Golongan C : Orang-orang yang terlibat atau diduga terlibat secara tidak langsung dengan peristiwa G 30 S

C. Klasifikasi A dan B diduga bersumber dari Keputusan Kopkamtib yang tidak pernah dipublikasikan, sedangkan klasifikasi golongan C justru tertuang dalam Keppres No. 28 tahun 1975. Klasifikasi kurang lebih sebagai berikut :

Golongan C ini diklasifikasi lagi menjadi 3, yakni :

C1. Golongan C yang menurut anteseden yang ada, pernah terlibat dalam peristiwa Madiun dan setelah terjadinya peristiwa G 30 S, baik dalam tindakan-tindakan maupun ucapan-ucapannya cenderung untuk senantiasa menguntungkan sisa-sisa G 30 S dan tidak secara tegas menentangnya, walaupun menurut kondisi dan kemampuan yang wajar dimungkinkan untuk menentangnya.

warga negara yang akan menjadi pegawai pemerintah melalui Program “Bersih diri dan Bersih Lingkungan” melalui Surat Keterangan Bersih Diri yang berlaku untuk bekas anggota PKI.

Setelah Kopkamtib dibubarkan dan diganti Bakorstannas ditahun 1988, program bersih diri diubah menjadi Litsus (Penelitian Khusus) bertujuan untuk menseleksi agar birokrasi tidak terinfiltrasi dari ekstrem kiri, ekstrem tengah dan ekstrem kanan. Sehingga sasarannya diperluas tidak hanya yang berhubungan dengan PKI tetapi juga yang berhubungan DI/TII, PRRI, PERMESTA, RMS dan lain-lain.

PENATARAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (P4)

Program Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dicanangkan pertama kali tahun 1978, dengan tujuan membangun masyarakat yang Pancasilais. Program ini juga difungsikan untuk memperkuat pemahaman akan Pancasila sehingga diharapkan dapat dibumikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan waktu itu, Pancasila diturunkan dalam butir-butir Pancasila dimana setiap Sila dalam Pancasila memiliki turunan-turunan praktis yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dituangkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978

tentang Ekaprasetya Pancakarsa yang menjabarkan kelima azas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan dasar negara. Program ini juga bertujuan untuk menangkal ideologi lain, yakni yang bersumber dari ekstrem kiri, ekstrim tengah dan ekstrim kanan. Selain itu program ini juga diharapkan dapat menjadi media untuk meningkatkan disiplin dan persatuan nasional. Pada saat keputusan ini diambil dalam Sidang MPR, anggota-anggota yang tergabung dalam Fraksi Persatuan Pembangunan menolak dan walk out dari sidang. Fraksi ini adalah kepanjangan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam implementasinya, pemerintah membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan dalam pelaksanaannya Presiden dibantu oleh Penasehat Presiden tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P7). Dalam kegiatan penataran ini terdiri dari mendengarkan ceramah, berpartisipasi dalam diskusi dan mempersiapkan serta mempresentasikan seminar. Penataran dilakukan dalam berbagai tipe kursus disesuaikan dengan hierarki serta tanggung jawab yang diharapkan diemban oleh peserta kursus. Untuk pejabat tingkat tinggi diwajibkan untuk mengikuti Penataran Type A

yang berlangsung beberapa bulan, untuk pejabat eselon dua diwajibkan untuk mengikuti penataran Type B. Kemudian untuk yang dibawahnya ada type yang lain dengan waktu yang lebih pendek dan materi yang lebih sederhana.

Sampai dengan tahun 1983, penataran P4 telah diikuti sekitar 2 juta pegawai negeri sipil dan perwira angkatan bersenjata. Selanjutnya penataran P4 terus dijalankan dan diperluas kepesertaannya. Pada tahun 1990, menurut Kepala BP7 Oetoyo Oesman, telah lebih dari 33 juta orang ikut Penataran P4 dan lebih dari 40 juta orang telah memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Pancasila melalui cara-cara yang lain. Dan program penataran ini dijalankan terus sampai Orde Baru berakhir.

ASAS TUNGGAL PANCASILA

Setelah Penataran P4 yang menyasar individu warga negara, maka tahapan selanjutnya dari proses ideologisasi adalah penempatan Pancasila sebagai azas dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dan kemudian kebijakan Azas Tunggal Pancasila ditetapkan sebagai salah satu poin dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang kemudian diwajibkan untuk Partai Politik dan Golkar melalui UU No. 3 tahun



Lambang Negara Burung Garuda Pancasila

1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, sedangkan untuk Ormas disahkan melalui UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan tanggal 17 Juni 1985.

Dalam pelaksanaannya, untuk penerapan di partai politik sudah langsung bisa diimplementasikan dan semua partai, baik PPP, PDI maupun Golongan Karya sudah langsung

menerima Azas Tunggal Pancasila. Sedangkan penerapan asas tunggal di Organisasi Kemasyarakatan menuai pro dan kontra, secara khusus Ormas Umat Islam. Ormas Islam yang pertama menerima asas tunggal adalah NU dan dideklarasikan pada Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984. Salah satu tokoh yang berhasil mendorong ini adalah KH. Abdurrahman Wahid, yang nantinya menjadi Presiden RI ke-4. Dan dengan diterimanya Asas Tunggal Pancasila oleh NU, menandai babak baru Ormas NU dalam konstelasi politik nasional, dari yang sebelumnya di kanan dan sering dicurigai rezim Orde Baru, menjadi ke tengah dan menjadi salah satu pilar persatuan Bangsa Indonesia.

Kemudian Muhammadiyah juga menerima asas tunggal dan dideklarasikan pada saat Mukhtamar Muhammadiyah tahun 1985. Selanjutnya untuk Himpunan Mahasiswa Islam menerima Azas Tunggal Pancasila pada saat Kongres HMI ke-16 di Padang. Namun ada sebagian yang menolak dan akhirnya membentuk Majelis Penyelamat Organisasi atau HMI MPO. Sedangkan Pelajar Islam Indonesia (PII) menolak asas tunggal dan karena tidak mendapatkan izin kongres dari pemerintah maka tahun 1987 PII membubarkan diri. Namun, di lingkungan beberapa kelompok umat melakukan penolakan sehingga terjadilah Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 yang dipimpin Amir Biki serta penolakan golongan lain

yang dipimpin Abu Bakar Ba'asyir, yang akhirnya melarikan diri ke Malaysia.

DWIFUNGSI ABRI

Pada tahun 1958, Jenderal AH Nasution berpidato didepan Taruna Akademi Militer Nasional di Magelang menawarkan konsep jalan tengah kepada Presiden Soekarno dimana tentara bisa berfungsi sebagai kekuatan sosial politik, namun tidak ingin seperti di Amerika Latin tentara menjadi kekuatan politik atau di Eropa Barat atau Eropa Timur dimana tentara menjadi alat mati pemerintah. Implementasi dari konsep ini, pada masa demokrasi terpimpin tentara mempunyai perwakilan di DPR GR masuk melalui jalur Golongan Karya dan tentara juga yang menginisiasi pembentukan Sekber Golkar.

Orde Baru melanjutkan konsep ini dan lebih dikenal sebagai Dwifungsi ABRI. Dimana ABRI mempunyai dua fungsi yakni sebagai kekuatan militer dan kekuatan sosial politik. Kekuatan militer dalam arti ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan dan ketertiban, sedangkan kekuatan sosial politik bermakna kekuatan dibidang Ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) dimana ABRI berfungsi sebagai penjamin stabilitas politik. Pada awal Orde Baru, konsep ini menemukan bentuk legitimasinya,

terutama karena kekuatan politik lain dalam demokrasi dipimpin telah runtuh, yakni PKI dan Presiden Soekarno. Sedangkan partai-partai politik telah runtuh lebih dulu ketika konstituante gagal dalam menjalankan fungsinya.

ABRI mendominasi dalam hampir seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsep ini, ABRI memiliki perwakilan sendiri di DPR dan MPR, ABRI juga masuk menjadi pejabat di lingkungan sipil, mulai dari kepala desa, camat, bupati/walikota, gubernur, menteri dan juga jabatan sipil yang lain. ABRI juga masuk sektor bisnis pemerintah di BUMN, seperti Jenderal Ibnu Sutowo di Pertamina dan AR Ramly di PT Timah. Sebagai kekuatan inti di Kopkamtib dan Bakorstanas, melalui program bersih diri dan litsus, ABRI lah yang menjadi penyeleksi dari para calon pejabat, anggota DPR, ketua ormas, ketua partai politik, bahkan seleksi Pegawai Negeri Sipil.

Penugasan tentara dalam tugas-tugas non militer dimulai tahun 1957. Kemudian berlanjut dan di era Dwifungsi Orde Baru, penugasan ini mencapai puncaknya pada tahun 1977 dimana terdapat 21.118 orang ditugaskan di sektor sipil dan kemudian tahun 1980 turun secara alamiah menjadi 16.830 orang. (David Jenkins 2010, Hal 263). Seperti tersampaikan dalam data dibawah :

JUMLAH ANGGOTA ABRI YANG BERTUGAS DI LUAR HANKAM

NO	JABATAN/KELOMPOK	JUMLAH MEI 1997		JUMLAH NOV 1980	
PEMERINTAH PUSAT					
1	Menteri/Ketua Badan Tinggi Negara	17	42,5%	19	47,5%
2	Sekretariat Jenderal	14	73,6%	14	73,6%
3	Inspektur Jenderal	18	29,5%	18	18,5%
4	Direktur Jenderal	15	78,5%	15	78,5%
5	Kepala Badan Non Departemen	8	44,4%	8	44,4%
6	Sekretaris/Asisten Menteri	21	84%	21	84%
	Jumlah	93	53,5%	95	53,5%
KEPALA DAERAH/PERWAKILAN LUAR NEGERI					
7	Gubernur	19	70,3%	19	70,3%
8	Bupati	136	56,4%	137	56,6%
KELOMPOK					
9	Walikota	19	31,6%	20	33,3%
10	Duta Besar	24	41%	28	44,4%
11	Kuasa Usaha	1	50%	1	55%
12	Konsul Jenderal	4	25%	4	25%
13	Konsul Indonesia	2	9,5%	2	9,5%
	Jumlah	205	31,9%	211	34,3%
KELOMPOK					
14	Penugaskaryaan			8.725	
15	Penyaluran			7.031	
16	Perbantuan			1.071	
	Jumlah			16.827	

STATUS					
17	Aktif	8.715		6.199	
18	MPP	12.405		1.597	
19	Pensiun	-		8.674	
	Jumlah	21.120		16.830	
20	Legislatif (MPR/DPR)	1.806		1.480	
21	Eksekutif	19.312		10.203	
ASAL SUMBER DAYA					
22	AD	17.004		12.873	
23	AL	926		823	
24	AU	698		777	
25	Polisi	2.490		2.357	
	Jumlah	21.118		16.830	

Sumber :

David Jenkins 2010, Hal 266, diambil dari : Pejuang dan Prajurit : Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI.

TENTARA DAN BISNIS

Sebenarnya tentara memasuki bisnis dimulai sejak saat Demokrasi Terpimpin. "Semenjak permulaan demokrasi terpimpin, pimpinan Angkatan Bersenjata sangat merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan pasukan-pasukannya serta pengeluaran-pengeluaran keuangan yang rutin. Keadaan itu telah melahirkan perwira militer yang dapat dinamakan "perwira-perwira pengusaha" (*entrepreneurial military officers*) dengan dukungan diam-diam dari Soekarno. Soekarno menyadari bahwa dirinya memerlukan kerjasama

dari pihak militer untuk melemahkan sistem parlementer dan untuk menumpas pemberontakan yang timbul di daerah sejak tahun 1956, sementara pihak militer memerlukan dukungan keuangan yang cukup, yang tidak selalu tersedia.

Disamping itu, kekuasaan Angkatan Bersenjata yang semakin besar telah memungkinkan perwira-perwiranya untuk memegang kekuasaan atas perusahaan-perusahaan yang dulunya milik Belanda yang telah diambil alih dan di nasionalisasi." (Yahya Muhaimin 1990, Hal173). Kemudian pola seperti ini berlanjut pada masa Orde Baru secara masif dan terstruktur, tentara memasuki bisnis dan salah satunya dengan cara menjadi pemimpin BUMN, seperti Jenderal Ibnu Sutowo di Pertamina dan AR Ramly di PT Timah.

Selain itu, ada pola yang lain disampaikan David Jenkins terjadi, Pola itu adalah tercermin dalam pandangan kelompok inti Soeharto sebagai berikut :

"Secara umum, kelompok inti tersebut punya pandangan yang sama dengan sejumlah perwira militer senior lainnya dalam hal bisnis. Mereka percaya agar operasi mereka berhasil diluar sistem ekonomi legal-rasional, perlu kerjasama saling menguntungkan dengan para cukong (pemilik dana yang umumnya orang Cina) serta modal asing". Selanjutnya dituliskan "Sedikit banyak masing-

masing memerlukan pemasukan teratur untuk tetap memelihara kegiatan dan posisi mereka saat berhadapan dengan kelompok lain. Kepentingan bisnis yang saling menopang ini bergaya patrimonial, bagian penting dalam menyatukan elit tersebut meskipun terdapat peluang konflik sebanyak peluang kerjasama diantara kelompok ekonomi yang berbeda” (David Jenkins 2010, Hal 35). Dari sini kelihatan bahwa bisnis para tentara ini berfungsi juga sebagai alat untuk menjaga posisi politik dan bargaining “antar kelompok politik” di sekitar kekuasaan. Dan pola seperti ini berlanjut pada masa reformasi, dimana peranan tentara digantikan oleh “partai politik” dengan dukungan rezim pemerintahan dan birokrasi.

Namun nampaknya pandangan seperti ini merupakan ciri umum sebagian tentara yang berkuasa waktu itu. Jenderal Soeharto pun tidak terlepas dari masalah ini, bahkan hal ini sudah terjadi sejak menjadi Panglima Kodam Diponegoro tahun 1950-an. Ketika Soeharto bekerja sama dengan Liem Sioe Liong (Sudono Salim) dan kemudian Bob Hasan. Yang ketika Soeharto menjadi Presiden semasa Orde Baru mereka pun diajak untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan dan menciptakan imperium bisnis dalam banyak sektor ekonomi nasional.

“Persahabatan Soeharto dengan Liem merupakan bagian dari cerita panjang sejarah Orde Baru. Bersama Mohamad “Bob” Hasan, ketiganya menjadi pusat pusaran arus ekonomi politik negeri ini hingga Orde Baru runtuh pada 1998, berbarengan dengan lengsernya Soeharto.” (Seri Buku Tempo, Soeharto 2018, Hal 64). “Namun, benarkah imperium bisnis ketiganya telah ambruk? sulit mempercayainya. Sebab, bagaimanapun ketiga konglomerasi yang menggurita puluhan tahun ini telah menjadi pilar ekonomi Indonesia. Jika roboh, bangunan ekonomi nasional pun runtuh seketika.” (Seri Buku Tempo, Soeharto 2018, Hal 68).

Dalam masa akhir Orde Baru akibat terjadinya perubahan geopolitik global karena perang dingin berakhir. Pola seperti ini menjadi salah satu penyebab jatuhnya rezim Orde Baru, lebih dikenal sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun kelompok politik-kelompok politik yang terbentuk akibat dari pola-pola kerjasama ini sebagai sebuah kekuatan politik masih hidup dan bersama kekuatan-kekuatan baru pasca reformasi bermetamorfosis dan saling mempengaruhi dalam proses politik yang terbentuk pasca reformasi sampai saat ini.

PEMILU DAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK

Pada tahun 1955 pemilu pertama dilakukan diikuti oleh 118 peserta, terdiri dari 36 Partai Politik, 34 Organisasi Massa, 48 Individu (calon perseorangan) untuk memperebutkan 257 kursi DPR. Sedangkan pemilihan anggota konstituante diikuti oleh 91 kontestan terdiri 39 Partai Politik, 23 Organisasi Massa dan 29 Individu yang memperebutkan 520 anggota konstituante. Kontestan yang ikut antara lain :

1. Partai Nasional Indonesia (PNI).
2. Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).
3. Partai Nahdlatul Ulama (NU).
4. Partai Komunis Indonesia (PKI).
5. Partai Syarikat Islam Indonesia.
6. Partai Kristen Indonesia.
7. Partai Katolik.
8. Partai Sosialis Indonesia.
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.
10. Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti).
11. Partai Rakyat Nasional.
12. Partai Buruh.
13. Gerakan Pembela Pancasila.
14. Partai Rakyat Indonesia.

1. Persatuan Pegawai Polisi RI.
2. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA).
3. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia.
4. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro.
5. Grinda.
6. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI).
7. Persatuan Dayak (PD).
8. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Hazairin.
9. Partai Politik Tarekat Islam (PPTI).
10. Angkatan Kemenangan Umat Islam (AKUI).
11. Persatuan Rakyat Desa (PRD).
12. Partai Republik Indonesia Merdeka.
13. Angkatan Komunis Muda (Akoma).
14. R. Soedjono Prawirosoedarso (Perseorangan).

Pemilu 1955 menghasilkan 28 kontestan yang memiliki wakil di DPR seperti diatas dan 4 partai besar yakni dengan perwakilan di DPR sebagai berikut PNI perwakilan 57, Masyumi perwakilan 57, NU perwakilan 45 dan PKI perwakilan 39.

Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, sesuai Keppres No. 4 tahun 60 tentang DPR Gotong Royong dan partai yang diakui serta mempunyai perwakilan di parlemen tinggal 9 partai, dengan komposisi suara yakni PNI 44, NU 36, PKI 30, Parkindo 6, Partai Katolik 5, PSII 5, Perti 2, Partai Murba 1,



Kontestasi Pemilu 1955

Sumber : kompas.com

Partindo 1 dan ditambah wakil-wakil dari Golongan Karya. Tahun 1962 tentara dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian mengkonsolidasikan diri berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian pada tahun 1964, sebagai respon dari Peraturan Presiden No. 193 tahun 1964 yang menginstruksikan seluruh organisasi di dalam Front Nasional untuk bergabung dengan parpol atau menjadi organisasi sendiri, tentara membentuk Sekber GOLKAR. Pembentukan Sekber ini ditandatangani oleh 53 serikat buruh dan organisasi pegawai negeri sipil, 10 organisasi cendekiawan, 10 organisasi pelajar, 5 organisasi perempuan, 4 asosiasi media, 2 organisasi nelayan dan petani serta pihak militer. (Kompas.com , 7 januari 2022). Sekber Golkar menjadi wadah dari Golongan Karya, yang tidak berada

dibawah pengaruh politik partai tertentu. Namun oleh ABRI, Sekber Golkar digunakan sebagai mesin elektoral, dilembagakan menjadi seperti partai politik dan diikutkan menjadi kontestan Pemilu 1971 serta di lingkungan tentara (ABRI) dibentuk Kepala Staf Kekaryaannya sebagai wujud dari konsep masuknya tentara dalam Sekber Golkar.

DEPOLITISASI DAN PEMILU ORDE BARU

Kontestan Pemilu 1971 mengambil dasar dari partai yang terdapat dalam Keppres 1960 dikurangi Partai Komunis Indonesia (PKI) karena telah menjadi partai terlarang, ditambah dengan anggota-anggota Golongan Karya yang terhimpun dalam Sekber Golkar dan Partai Muslimin Indonesia sebagai penjelmaan dari Masyumi yang telah dibubarkan saat demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Pemilu 1971 memilih 360 anggota DPR dari 460 seluruhnya. 100 anggota sisanya diisi oleh utusan golongan dari ABRI 75 sebagai implementasi Dwifungsi ABRI dan 25 dari utusan golongan lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Golkar sebagai kontestan pemilu yang sepenuhnya didukung oleh ABRI, memerlukan kemenangan yang signifikan dalam Pemilu tahun 1971. Namun, "para penguasa militer tidak begitu yakin bahwa Sekber Golkar akan dapat memenangkan

mayoritas suara dalam pemilihan umum mendatang pada 1971. Soemitro yang ketika itu menjadi tokoh kunci dari kelompok yang berkuasa, percaya bahwa Golkar (nama ini yang kemudian dikenal) tidak punya peluang untuk memenangkan sendirian. Jika kita serahkan saja ke Golkar pada tahun 1971 tanpa intervensi ABRI, Partai-Partai Islam akan memenangkan pemilihan umum” (David Jenkins 2010, Hal 48). Kemenangan Golkar penting, karena menjadi legitimasi politik bahwa pemerintah mendapatkan dukungan dari rakyat melalui pemilu. Dan intervensi dari ABRI untuk kemenangan Golkar ini tentu dengan berbagai metode yang bervariasi, berlangsung terus sampai pemilu terakhir Orde Baru tahun 1997.

Pemilu akhirnya berjalan dengan Golkar menang 62 persen, seperti komposisi berikut:

1. Golongan Karya 62,80 % dengan 236 anggota.
2. Nahdlatul Ulama 18,67 % dengan 58 anggota.
3. Partai Nasionalis Indonesia 6,93 % dengan 20 anggota.
4. Partai Muslimin Indonesia 20,92 % dengan 24 anggota.
5. PSII 2,39 % dengan 10 anggota.
6. Parkindo 1,34 % dengan 7 anggota.
7. Partai Katolik 1,1% dengan 3 anggota.
8. PERTI 0,69 % dengan 2 anggota.

Sedangkan Partai MURBA dan IPKI tidak memiliki perwakilan di DPR. Pada tahun 1973, 460 anggota DPR hasil pemilihan umum menjadi peserta sidang MPR yang berjumlah 920 orang, dengan tambahan anggota lain yang diangkat oleh Presiden, terdiri dari :

1. Anggota ABRI 214 orang.
2. Utusan Daerah 146 orang.
3. Utusan Golongan non-ABRI 100 orang.

Tahun 1973, MPR bersidang dengan agenda : 1) Menetapkan GBHN, 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 3) Membahas perubahan dan ketetapan-ketetapan MPR, 4). Menetapkan ketetapan-ketetapan MPR baru. Dalam sidang MPR 1973, akhirnya Soeharto dipilih untuk menjadi presiden untuk periode lima tahun sampai dengan tahun 1978, dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden.

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK

Salah satu kebijakan depolitisasi Orde Baru adalah dilakukan fusi partai politik. Fusi ini bertujuan untuk mengurangi peran partai politik dan pengaruh partai politik dalam masyarakat. Pada tahun 1973 dilakukan penyederhanaan kontestan peserta pemilu dari 10 kontestan menjadi 3 yakni :

1. Golongan Karya (tetap, bukan partai politik).

2. Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan gabungan dari Partai-Partai Islam yakni : NU, Parmusi, Perti dan PSII.
3. Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Murba, Parkindo, Partai Katolik dan IPKI.

POLITIK MASSA MENGAMBANG

Kebijakan politik massa mengambang bertujuan untuk membebaskan rakyat, terutama di desa-desa dan akar rumput dari pengaruh partai politik. Seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya, dimana kepengurusan partai politik hanya boleh sampai Tingkat Kabupaten. Hal ini diperkuat dalam amanat GBHN tahun 1978 dan 1982, dimana dinyatakan bahwa wadah-wadah penyalur pendapat dan aspirasi masyarakat pedesaan perlu disempurnakan dan dimantapkan, sehingga rakyat terbebas dari saluran aspirasi partai politik. Namun dalam prakteknya, kebijakan ini tidak berlaku bagi Golongan Karya, karena dengan jalur kekuatan ABRI dan Departemen Dalam Negeri, Golkar mampu menjangkau rakyat sampai di pedesaan.

Dengan format politik seperti diatas, pemilu selama Orde Baru telah berjalan dengan hasil Golkar selalu menang, seperti berikut :

PEMILU - TAHUN 1977

Golkar 62,11% dengan 232 anggota.

PPP 29,29% dengan 99 anggota.

PDI 8,60% dengan 29 anggota.

PEMILU - TAHUN 1982

Golkar 64,34% dengan 242 anggota.

PPP 27,78% dengan 94 anggota.

PDI 7,88% dengan 24 anggota.

PEMILU - TAHUN 1987

Golkar 73,16% dengan 299 anggota.

PPP 15,97% dengan 61 anggota.

PDI 10,87% dengan 40 anggota.

PEMILU - TAHUN 1992

Golkar 68,10% dengan 282 anggota.

PPP 17,01% dengan 62 anggota.

PDI 14,89% dengan 56 anggota.

PEMILU - TAHUN 1997

Golkar 74,51% dengan 325 anggota.

PPP 22,43% dengan 89 anggota.

PDI 3,06% dengan 11 anggota.

Dalam setiap Sidang Umum MPR, Jenderal Soeharto selalu terpilih menjadi Presiden RI. Dengan wakil-wakil presiden sebagai berikut :

1973 - 1978	Sri Sultan Hamengkubuwono IX
1978 - 1983	Adam Malik
1983 - 1988	Soedharmono
1988 - 1993	Umar Wirahadikusumah
1993 - 1998	Try Soetrisno
1998 - 1999	B.J. Habibie

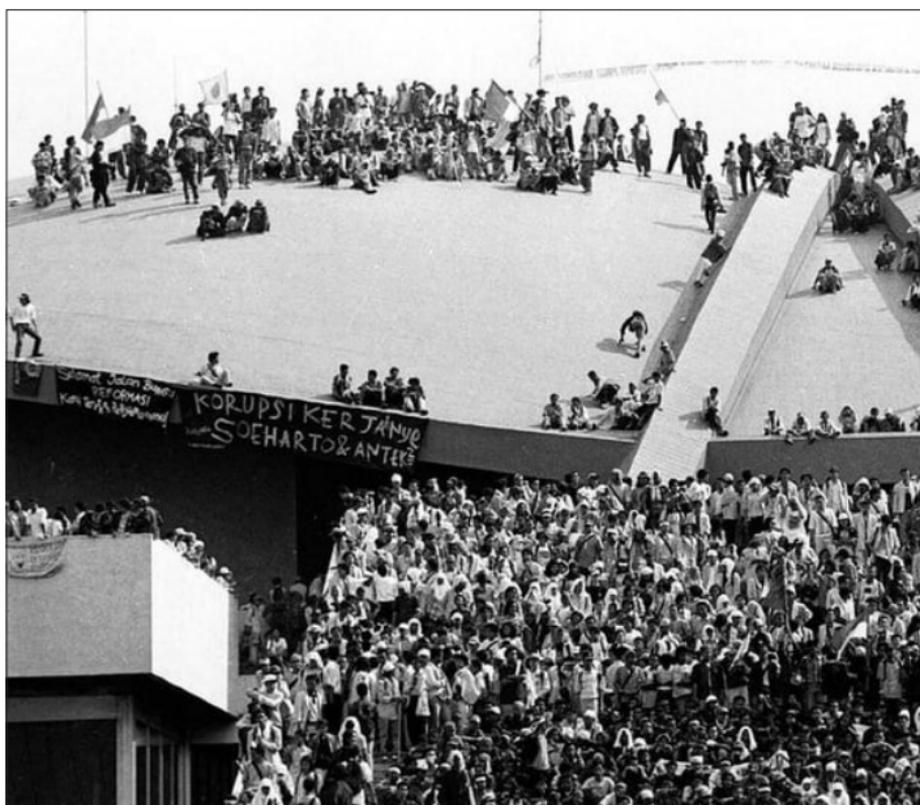
Pada pemilu tahun 1997 sebagai pendukung utama Presiden, Golkar menang dengan angka tertinggi dalam Sejarah Pemilu Orde Baru dengan angka 74,5%. Namun ironisnya, dua tahun pasca pemilihan, Presiden Soeharto harus memutuskan untuk mengundurkan diri karena desakan gerakan mahasiswa dan digantikan oleh B.J. Habibie.

REFORMASI DAN JATUHNYA REZIM ORDE BARU

Pasca pengunduran diri Presiden Gorbachev tanggal 25 Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar dan terpecah menjadi beberapa negara. Runtuhnya Uni Soviet ini menciptakan dampak antara lain : 1) Munculnya negara-negara baru bekas negara bagian Uni Soviet dan negara-negara baru di

bekas blok komunis di Eropa Timur, 2) Menimbulkan krisis ekonomi di Eropa Timur. Keruntuhan Uni Soviet ini menjadi tanda 1) Berakhirnya Era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, 2) Kehancuran Sistem Komunis di dunia.

Sebelumnya, Cina dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping juga telah melakukan revisi dan modernisasi konsep kenegaraan



Mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR, menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

dari berbasis Komunisme dan Marxisme yang menjadi sistem cenderung kapitalistik. Dunia yang awalnya bipolar berubah menjadi unipolar dimana dominasi Amerika Serikat dan Blok Barat menjadi tidak ada saingannya lagi. Kebijakan Gorbachev, Glasnost dan Perestroika menjadi gerakan yang mendunia, termasuk di dalam Negeri Indonesia yang lebih dikenal dengan Gerakan Reformasi.



Sumber : kompas.com

Gerakan ini mendapatkan momentumnya ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda Asia dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Disebabkan krisis ekonomi dan krisis legitimasi akibat gerakan mahasiswa dan rakyat, pada akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden tanggal 21 Mei 1998. Pada saat bersamaan, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menggantikan Presiden Soeharto menjadi Presiden dan dimulailah Era Baru Republik Indonesia. MPR juga mengeluarkan Ketetapan

Nomor XI/MPR/1998 yang berisi tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dimana nama Presiden Soeharto disebutkan secara khusus pada pasal 4, berbunyi : *"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroni maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia"*.



Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie

Sumber : kompas.id

PRESIDEN RI KE-3 : BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE (1998 - 1999)

Presiden B.J. Habibie memerintah selama 17 bulan. Dalam waktu bersamaan Presiden Habibie harus melakukan recovery ekonomi, melakukan koreksi-koreksi kebijakan yang menciptakan landasan ekonomi dan politik untuk transisi dari Era Orde Baru menuju Era Reformasi. Tercatat

ada 67 Undang-Undang yang disahkan dalam periode ini dan yang menonjol antara lain :

1) Kebebasan Pers melalui UU Nomor 40 tahun 1999, 2) Otonomi Daerah melalui UU No. 22 tahun 1999, 3) Berakhirnya diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa melalui Inpres No. 26 tahun 1999 dan Inpres No. 4 tahun 1999, 4). Bank Indonesia yang Independen melalui UU No. 23 tahun 1999, 5). Pemilu yang demokratis melalui UU Pemilu No. 2 tahun 1999. Dalam masa ini juga diputuskan TAP MPR yang mengatur pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yakni No. XIII/MPR/1998 tahun 1998, serta TAP MPR No. XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dimana ada nama Presiden Soeharto secara khusus dalam ketetapan itu.

PENCABUTAN DOM ACEH DAN PERISTIWA JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

Pasca dilantik sebagai Presiden pada tanggal 7 Agustus 1998, Presiden Habibie secara resmi mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh. Operasi Militer yang berlangsung sejak 1989 ini digunakan untuk melawan GAM, sebuah gerakan yang ingin melepaskan Aceh dari Republik Indonesia. Namun operasi ini banyak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemudian Presiden

Habibie juga memutuskan untuk menerima Jajak Pendapat untuk menentukan nasib Timor Timur.

Selain itu, pada tahun 1999 terjadi kerusuhan sosial akibat konflik keagamaan di Maluku yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan baru selesai setelah Perjanjian Malino tahun 2002.

Pada tahun 1976 akibat Politik Dekolonisasi Portugal, Timor Timur memiliki kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Terdapat tiga aspirasi rakyat yang berkembang, salah



Kontestasi Pemilu 1955

Sumber : kompas.com

satunya adalah bergabung dengan Republik Indonesia yang diwakili oleh Partai APODETI (Asosiasi Demokratik Rakyat Timor). Sehingga dilakukanlah Operasi Militer dan akhirnya Timor Timur masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Namun di Forum PBB, Portugal menyatakan keberatan dengan langkah yang diambil Indonesia. Sehingga Timor Timur masuk dalam beberapa kali pembahasan di Sidang Umum PBB dan akhirnya melalui Voting diputuskan agar Rakyat Timor Timur bisa menentukan nasibnya sendiri. Namun agenda jajak pendapat itu belum dijalankan dan pada tahun 1999, Presiden Habibie menyetujui proses jajak pendapat, yang akhirnya Rakyat Timor Timur memutuskan untuk merdeka dan berpisah dari Indonesia. Lepasnya Timor Timur ini juga berkaitan dengan perubahan geopolitik dunia dan posisi politik Indonesia di mata dunia internasional. Dan karena faktor ini pula, nantinya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR.

PEMILU PERTAMA PASCA ORDE BARU

Sesuai jadwal pemilu lima tahunan Orde Baru, harusnya pemilu dilakukan tahun 2002. Namun karena ada kebutuhan untuk memperbaharui mandat politik setelah reformasi, Pemerintahan Presiden Habibie menyelenggarakan pemilu lebih awal yakni tahun 1999 dengan dasar UU Pemilu No. 3 tahun 1999. Pemilu ini menandai dimulainya demokrasi

dengan sistem multi partai di Indonesia, dimana telah terjadi perubahan rezim Orde Baru yang otoriter menuju rezim yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilu diselenggarakan dengan sistem proposional tertutup di provinsi secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 kontestan partai politik, namun hanya 21 partai yang berhasil masuk parlemen, dengan komposisi suara sebagai berikut :

NO	PARTAI	SUARA	PERSENTASE	KURSI
1	PDIP	35.706.618	33,7	153
2	GOLKAR	23.742.112	22,4	120
3	PKB	13.336.963	12,6	51
4	PPP	11.330.387	10,7	58
5	PAN	7.528.936	7,1	34
6	PBB	2.050.039	1,9	13
7	PK	1.436.670	1,4	7
8	PKP	1.063.810	1,0	4
9	PNU	679.174	0,6	5
10	PDI	655.048	0,6	2
11	PP	590.995	0,6	1
12	PDKB	550.856	0,5	5
13	PPIIM	456.750	0,4	1
14	PDR	427.875	0,4	1
15	PSII	376.411	0,4	1

16	PNI FM	365.173	0,4	1
17	PNI	364.257	0,3	1
18	PNI MM	345.665	0,3	1
19	IPKI	328.440	0,3	1
20	PKU	300.049	0,3	1
21	PKD	216.663	0,2	1
	Partai lain-lain	3.991.046	3,8	0

Sumber : Dwight Y King (2003: 92-93)

Setelah pemilu selesai, MPR melaksanakan Pemilihan Presiden (20 Oktober 1999) dan Wakil Presiden (21 Oktober 1999) masa bakti tahun 1999 - 2004. Anggota MPR berjumlah 700 anggota terdiri dari 500 anggota DPR hasil pemilihan, 135 anggota utusan daerah dan 65 anggota utusan golongan dari TNI dan POLRI. Sidang MPR berhasil memilih KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden.



Presiden Kh. Abdurrahman Wahid

Sumber : jurnas.com

PRESIDEN RI KE-4 : KH. ABDURRAHMAN WAHID (1999 - 2001)

KH. Abdurrahman Wahid menjabat presiden selama 22 bulan. Selain mengatasi persoalan ekonomi akibat krisis ekonomi, sejumlah kebijakan politik diputuskan antara lain :

- 1) Pembubaran Kementerian Penerangan,
- 2) Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua,
- 3) Pemisahan TNI dan POLRI,
- 4) Mengakui Konghucu sebagai agama resmi dan Imlek

menjadi hari libur nasional.

Pada masa pemerintahannya, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya diatur oleh TAP MPR, masuk dalam amandemen pertama UUD 1945 tahun 1999, pada pasal 7, berbunyi sebagai berikut “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

PEMAKZULAN PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID

Pada tahun 2001, Sidang Istimewa MPR digelar dengan agenda Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Sidang ini dilakukan setelah sebelumnya dikeluarkan memorandum pertama pada tanggal 1 Februari 2001, kemudian disusul memorandum kedua pada tanggal 30 April 2001, disertai permintaan DPR agar dilakukan Sidang Istimewa. Langkah ini dilakukan setelah Presiden mengeluarkan ketetapan yang menyatakan pembubaran DPR/MPR, penangguhan Partai Golkar dan penyelenggaraan Pemilu dalam satu tahun. Namun dalam sidang MPR, Keputusan ini tidak mendapat dukungan, sehingga Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan melalui Ketetapan MPR

Nomor II tahun 2001 tentang Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

Kemudian Sidang Istimewa juga dilakukan dengan agenda Pemilihan Presiden. Dan akhirnya terpilih Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden RI Ke-5. Selanjutnya dilakukan agenda pemilihan Wakil Presiden dan terpilih Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden RI.



Presiden Megawati Soekarno Putri

Sumber : Liputan6.com

PRESIDEN RI KE-5 : MEGAWATI SOEKARNO PUTRI (2001 - 2004)

Megawati adalah Presiden Perempuan Pertama Indonesia, yang memerintah dari tahun 2001 - 2004. Selain menyelesaikan masalah ekonomi akibat krisis, periode ini masih menjadi fase peletakan dasar-dasar demokrasi dan hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai koreksi atas kebijakan selama Orde Baru. Pada masa

ini diputuskan, 1) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002, 2) Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui UU No. 24 tahun 2003, 3) Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 4) Pemilihan Presiden Secara Langsung melalui UU No. 23 tahun 2003, 5) UU No. 20 tahun 2004 tentang Pemilu Untuk Pemilihan Legislatif dan DPD.

Dalam masa Kepresidenan Megawati, masih terjadi gerakan separatisme yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada bulan Desember 2002, dengan mediator Lembaga Pusat Dialog Kemanusiaan. GAM dan Indonesia menandatangani perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA), namun hanya berlangsung beberapa bulan, pelanggaran perjanjian terjadi. Sehingga pemerintah melancarkan Operasi Militer tahun 2002 - 2004 untuk menumpas GAM. Kemudian untuk penyelesaian masalah Papua, pemerintah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dalam pandangan pemerintah selanjutnya OPM berubah menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Selain itu, pada masa ini terjadi tiga kali peristiwa terorisme yakni Bom Bali 1, Bom JW Marriot dan Bom di McDonald's Makassar.

Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama pasca amandemen UUD 1945. Pemilu ini dijalankan dua kali, pertama tanggal 5 April 2004, untuk memilih anggota Legislatif dan DPD. Kemudian pemilu kedua, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk putaran pertama tanggal 5 Juli 2004 dan 20 September 2004 untuk putaran kedua. Untuk pemilu legislatif diikuti oleh 24 kontestan partai politik dan 18 partai politik berhasil lolos ke parlemen.

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2004

NO	PARTAI	SUARA	PERSENTASE	KURSI
1	GOLKAR	24.460.757	21,6	127
2	PDIP	21.026.629	18,5	109
3	PKB	11.989.564	10,6	52
4	PPP	9.248.764	8,2	58
5	PD	8.455.225	7,5	56
6	PKS	8.325.020	7,3	45
7	PAN	7.303.324	6,4	53
8	PBB	2.970.487	2,6	11
9	PBR	2.764.998	2,4	14
10	PDS	2.414.254	2,1	13
11	PKPB	2.399.290	2,1	2
12	PKPI	1.424.240	1,3	1
13	PPDK	1.313.654	1,2	4
14	PNBK	1.230.450	1,1	0
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	1,0	0

16	PNI Marhaenisme	929.159	0,9	1
17	PNUI	895.610	0,8	2
18	Partai Pelopor	878.932	0,8	
19	PPDI	855.811	0,8	
20	Lain -lain	3.489.107	3,1	

Dalam proses pemilu tahun 2004, sudah mulai diperkenalkan metode survei dan quick count dalam memprediksi perolehan suara masing-masing kontestan pemilu. Lembaga LP3ES-NDI mengeluarkan rilis bahwa Golkar akan memenangkan pemilu dengan suara 22,7%. Dan ternyata selisihnya dengan perhitungan real KPU masih dalam rentang margin error.

Berdasarkan hasil pemilu tersebut, partai yang memenuhi syarat minimal 5% dan kursi parlemen minimal 3% ada tujuh, sehingga ada tujuh partai politik memenuhi syarat untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, yakni : Golkar, PDIP, PKB, PPP, PD, PKS dan PAN. Namun hanya ada lima pasangan yang ikut kontestasi yakni : Megawati Soekarno Putri/KH. Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono/Jusuf Kalla, Amin Rais/Siswono Yudho Husodo, Wiranto/Salahuddin Wahid, Hamzah Haz/Agum Gumelar. Hasil pemilu putaran pertama, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi unggul, namun setelah memasuki putaran kedua, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla unggul dan memenangkan Pilpres langsung pertama tahun 2004.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Sumber : Liputan6.com

PRESIDEN RI KE-6 : SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004 - 2014)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung, berkuasa selama 10 tahun. Pada periode pertama (2004 - 2009) berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemudian terpilih kembali pada

periode kedua (2009 - 2014) berpasangan dengan Wakil Presiden Boediono. Pada tahun 2009, untuk pemilu legislatif diikuti oleh 38 partai politik. Sedangkan yang berhasil lolos Parliamentary Threshold 2,5% ada 9 partai yaitu :

NO	PARTAI	SUARA	PERSENTASE	KURSI
1	Partai Demokrat	21.703.137	20,85	148
2	Partai Golkar	15.037.757	14,45	107
3	PDIP	14.600.091	14,03	94
4	PKS	8.206.955	7,88	57
5	PAN	6.254.580	6,01	46
6	PPP	5.533.214	5,32	37
7	PKB	5.146.122	4,94	28
8	Partai Gerindra	4.646.406	4,46	26
9	Partai Hanura	3.922.870	3,77	17
10	Lain - lain	19.048.653	18,29	0

pertama yang dipilih secara langsung, berkuasa selama 10 tahun. Pada periode pertama (2004 - 2009) berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemudian terpilih kembali pada periode kedua (2009 - 2014) berpasangan dengan Wakil Presiden Boediono. Pada tahun 2009, untuk pemilu legislatif diikuti oleh 38 partai politik. Sedangkan yang berhasil lolos Parliamentary Threshold 2,5% ada 9 partai yaitu :

NO	PARTAI	SUARA	PERSENTASE	KURSI
1	PDI Perjuangan	23.681.471	18,95	109
2	Partai Golkar	18.432.312	14,75	91
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81	73
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,19	61
5	PKB	11.298.957	9,04	47
6	PAN	9.481.621	7,59	49
7	PKS	8.480.204	6,79	40
8	Nasdem	8.402.812	6,72	35
9	PPP	8.157.488	6,53	39
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26	16

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan kebijakan yang menyangkut pemenuhan hak asasi warga negara, antara lain, 1) Wajib Belajar 12 tahun dan alokasi anggaran 20% untuk Pendidikan, 2) Pembentukan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 3) Mandatory Spending untuk Kesehatan yakni 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Selain itu, juga kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar untuk pembangunan infrastruktur yakni UU No. 2 tahun 2012 dan UU Desa.

Selain itu, pada masa pemerintahan ini juga diwarnai tindak kejahatan terorisme yakni, Bom Marriot (2009), Solo (2009), juga konflik agama yang menyebabkan kerusuhan sosial yakni Poso (2004 - 2007) dan bencana alam dengan

jumlah korban yang besar, yakni : 1) Tsunami Aceh (2004), 2) Gempa Bantul (2006), 3) Semburan Lumpur Lapindo (2006) dan 4) Letusan Gunung Merapi (2010). Pada tahun 2005 juga ditandatangani perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia di Helsinki Negara Finlandia.

Selanjutnya pada tahun 2014 diselenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk pemilihan legislatif diikuti 12 kontestan partai politik dengan 10 partai politik berhasil memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold 3,5% yakni :

Kemudian untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasangan, yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla dan dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla.



Presiden Joko Widodo

Sumber : fahum.umsu.ac.id

PRESIDEN RI KE-7 : JOKO WIDODO (2014 - 2024)

Presiden Joko Widodo adalah presiden kedua yang dipilih secara langsung dan berkuasa selama 10 tahun. Pada periode pertama berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014 - 2019), sedangkan pada periode kedua berpasangan dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin (2019 - 2024). Pada pemilu tahun 2019 diselenggarakan pemilu

legislatif diikuti oleh 20 kontestan, dengan 9 partai berhasil lolos Parliamentary Threshold 4 % yaitu:

NO	PARTAI	SUARA	PERSENTASE	KURSI
1	PDI Perjuangan	27.053.961	19,33	128
2	Partai Gerindra	17.594.839	12,57	78
3	Partai Golkar	17.229.789	12,31	85
4	PKB	13.570.097	9,69	58
5	Nasdem	12.661.792	9,05	59
6	PKS	11.493.663	8,21	50
7	Demokrat	10.876.507	7,77	54
8	PAN	9.572.623	6,84	44
9	PPP	6.323.147	4,52	19

Sumber : KPU

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satu isu politik yang menonjol adalah terjadinya polarisasi yang dipengaruhi oleh faktor identitas agama dan etnis, seperti Kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Selain itu polarisasi juga sudah terjadi sejak Pilpres 2014, ketika terjadi kompetisi antara pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Polarisasi ini menemukan momentumnya karena didukung oleh penggunaan media sosial sebagai media penyebaran informasi, meski beberapa faktanya cenderung bias dan hoax.

Presiden Joko Widodo dikenal berhasil dalam program infrastruktur, selain itu juga dikeluarkan program populis

berbasis anggaran yang langsung menyasar individu, seperti yang diimplementasikan dalam bentuk kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial yang diwujudkan dalam bentuk barang maupun uang tunai dan lain-lain. Pada tanggal 16 Agustus 2019 saat Sidang MPR, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Namun pasca pengumuman ini, pada tahun 2020 dunia dilanda Wabah Covid 19 termasuk Indonesia. Sehingga baru ditindaklanjuti menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, kemudian disusul perubahannya melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2023.

Dalam masa pemerintahannya, setidaknya ada dua peristiwa hukum yang menonjol yakni Revisi Undang-Undang KPK yang mengurangi kewenangan KPK dalam penegakan hukum beserta tes wawasan kebangsaan atau semacam litsusnya Orde Baru untuk menyeleksi pegawai KPK berdasarkan UU yang baru. Peristiwa hukum lain adalah perubahan syarat umur calon wakil presiden yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden yang menjadi pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto.

Pada tahun 2024 diselenggarakan pemilu Legislatif,

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) bersamaan dalam tahun yang sama. Untuk pemilu legislatif diikuti oleh 18 kontestan dan 8 partai politik yang berhasil lolos Parliamentary Threshold 4% adalah :

NO	PARTAI	SUARA	PERSENTASE	KURSI
1	PDI Perjuangan	25.387.279	16,72	110
2	Partai Golkar	23.208.654	15,29	102
3	Partai Gerindra	20.071.708	13,22	86
4	PKB	16.115.655	10,62	68
5	Nasdem	14.660.516	9,66	69
6	PKS	12.781.353	8,42	53
7	Partai Demokrat	11.283.160	7,43	44
8	PAN	10.984.003	7,24	48

Sumber : KPU

Sedangkan untuk Pilpres diikuti oleh tiga pasangan calon yakni, Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, kemudian pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran.

Pasca pelaksanaan pemilihan, MPR mencabut tiga ketetapan MPR yang kontroversial yakni : 1) TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno, yang mencabut pasal

penegakan hukum kepada Presiden Soekarno sebagai upaya pemulihan nama baik Presiden Soekarno, 2). TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang menyebut proses hukum secara khusus nama Presiden Soeharto dan pemulihan nama baik mantan Presiden Soeharto, 3). TAP MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Pencabutan tiga ketetapan ini penting untuk digunakan sebagai landasan simbolis rekonsiliasi nasional menyambut babak baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.



Presiden Prabowo Subianto

Sumber : fahum.umsu.ac.id

PRESIDEN RI KE-8 : PRABOWO SUBIANTO (2024 - 2029)

Untuk periode ini (2024 - 2029), Presiden Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Selain harus menunaikan janji-janji kampanye, Presiden Prabowo menghadapi situasi dan problem yang merupakan akumulasi dari proses panjang berbangsa dan bernegara pemerintahan sebelum-sebelumnya.

Untuk mengatasinya dirumuskan Program Asta Cita sebagai berikut : 1) Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, 2) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional, 3) Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan, 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender, 5) Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Nilai Tambah Ekonomi, 6) Pembangunan dari Desa Untuk Pemerataan Ekonomi, 7) Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba, 8) Harmoni Lingkungan, Budaya dan Toleransi Beragama.

PERGERAKAN DAN PEMBAHARUAN

Menurut Wikikamus, pergerakan berasal dari kata dasar gerak, mengandung arti : 1) Perihal atau keadaan bergerak, 2) Kebangkitan (untuk perjuangan atau perbaikan), seperti dalam kalimat : pada waktu itu, pergerakan nasional muncul dimana-mana.

Pembaharuan menurut wikikamus, mengandung arti adalah "orang atau lembaga yang mendorong terciptanya perubahan sosial ekonomi secara berencana (seperti penyuluh pertanian, guru). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyampaikan arti kata pembaharuan berasal dari kata

ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan pembaharuan ada 22 arti yakni renovasi, penyempurnaan, peremajaan, modernisasi, pembaruan, pemodernan, tajdid, alih generasi, inovasi, pembangunan, pembinaan, pemugaran, pemulihan, pemutakhiran, penyegaran, perbaikan, perombakan, reaktualisasi, reformasi, regenerasi, rehabilitasi serta restorasi. Artinya pembaharuan memiliki makna yang luas dan mencakup 22 arti yang telah disebutkan terdahulu.

Dalam konteks Nusantara, pembaharuan yang dimaksud adalah langkah-langkah lanjutan yang diperlukan sebagai tahapan yang merupakan fondasi dan kerangka yang membingkai perkembangan bangsa dan negara, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan menuju bangsa dan negara sesuai cita-cita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni : 1) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesi, 2) Memajukan Kesejahteraan Umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Oleh karena itu, pergerakan pembaharuan ini merujuk dan bersumber pada UUD 1945 yang paling akhir sesuai dengan Amandemen IV tahun 2002, dengan tetap bernama sebagai

UUD 1945. Berbeda dengan gagasan beberapa kelompok yang ingin kembali pada UUD 1945 yang sesuai naskah pertama ketika diputuskan tahun 1945. Oleh karena itu, gerakan ini memandang semua naskah UUD 1945, baik yang diputuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, maupun saat amandemen UUD tahun 1999 - 2002, semuanya adalah asli dan masing-masing dibedakan sesuai dengan urutan diputuskannya. Sehingga dalam konsep ini, naskah yang diputuskan berurutan sesuai waktu sebagai berikut : 1) Naskah Pertama UUD 1945 adalah naskah yang diputuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, 2) Naskah Kedua UUD 1945 adalah hasil amandemen tahun 1999, 3) Naskah Ketiga UUD 1945 adalah hasil amandemen tahun 2000, 4) Naskah Keempat UUD 1945 adalah hasil amandemen tahun 2001, sedangkan yang terakhir dan berlaku adalah, 5) Naskah Kelima UUD 1945 adalah hasil amandemen tahun 2002.

Keinginan kembali kepada Naskah Pertama UUD 1945 memiliki kelemahan mendasar, antara lain :

1. Keinginan ini tidak sesuai dengan pokok pikiran Naskah Pertama UUD 1945, tercantum dalam Bab Perubahan Undang-Undang Dasar, Pasal 37 ayat (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus

hadir. (2) Putusan diambil sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Dari dua ayat dalam pasal 37 ini, nampak sekali para pendiri bangsa sudah menyadari kemungkinan perubahan itu sendiri maka diatur dalam pasal 37 ini. Sehingga keinginan untuk kembali kepada Naskah Pertama UUD 1945 adalah tidak sesuai dengan pokok pikiran para pendiri bangsa, sesuai yang dicantumkan dalam pasal 37.

2. Membuka kembali aturan "tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden". Aturan ini secara alami akan mengancam proses demokrasi, sudah terbukti secara historis khususnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika diterapkan zaman Orde Lama maupun Orde Baru, banyak ekses-ekses yang ditimbulkan yang ujungnya membuat Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto jatuh.
3. Membuka opsi pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sebagai negara dan bangsa yang besar, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat secara institusional. Presiden tidak boleh mudah untuk dijatuhkan, sehingga opsi pemilihan presiden secara langsung adalah salah satu pilihan yang memungkinkan, namun ada pembatasan masa jabatan Presiden. Karena kepemimpinan nasional

yang kuat ini penting untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia.

4. Membuka opsi bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Final” dicabut dan opsi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi bisa berubah. Pada tahun 2002 disepakati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final dan tidak bisa diubah. Diputuskan saat amandemen ke 4 UUD 45, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final dan tidak bisa diubah. Tercantum dalam Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar, pasal 37 ayat 5 berbunyi :

“Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Sehingga dalam Naskah Kelima UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah harga mati. Pasal ini memperkuat posisi sebelumnya yang tercantum dalam Bab I Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1 ayat 1, yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Diperlukan waktu 57 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan untuk mencapai kesadaran bersama bahwa bentuk Negara

Kesatuan adalah bentuk final yang menjadi persatuan nasional dan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia.

Lantas, pergerakan pembaharuan seperti apakah yang diperlukan?. Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa sumber dan rujukan pergerakan ini adalah UUD 1945, maka dari itu langkah yang diusulkan merujuk kepada UUD 1945 juga. Namun sebelum masuk pada pokok bahasan ini, ada baiknya diuraikan apa saja “penyakit-penyakit bawaan periode Orde Lama dan Orde Baru”, kemudian problem apa yang muncul dan berlanjut pada masa reformasi dan apa saja langkah yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.





AGENDA PEMBAHARUAN

DUA WAJAH PARTAI POLITIK : Tuduhan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan Penyalur Aspirasi - Pelayan Rakyat

Salah satu buah dari reformasi adalah dibukanya keran partisipasi rakyat dan penyaluran aspirasi melalui partai politik dalam pemilu. Hal ini terlihat dari kontestan pemilu tahun 1999 yang mencapai 48 partai politik. Kemudian mulai tahun 2004 dilakukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, juga dilakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebagai salah satu pilar

kekuatan politik pelaku utama demokrasi, partai-partai politik yang muncul pasca reformasi mempunyai fungsi yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut :

1. Partai Politik Sebagai sarana Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partai Politik sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik Warga Negara Indonesia.
5. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun dalam menjalankan fungsi diatas, partai politik harus bersaing dan berkompetisi dengan partai yang lain untuk mendapatkan kursi parlemen (anggota legislatif) termasuk didalamnya adalah persaingan dalam pengisian jabatan politik dari Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil

Walikota, Gubernur-Wakil Gubernur serta Presiden-Wakil Presiden. Dalam proses ini, pada tahun 2018 partai politik mendapatkan pendanaan dari pemerintah melalui dua metode yakni :

1. Dana Bantuan Partai Politik merujuk kepada PP No. 1 tahun 2018 diatur untuk tingkat nasional dihitung Rp 1.000/suara bersumber dari APBN dan Rp 1.200/suara untuk tingkat provinsi bersumber dari APBD Provinsi dan Rp 1.500/suara untuk tingkat kabupaten. Sebagai contoh untuk PDIP yang mendapatkan suara 25.387.279 dalam pemilu 2024 maka berdasarkan perhitungan ini, ditingkat nasional akan mendapatkan bantuan pendanaan kurang lebih sebesar Rp 25.387.279.000, kemudian apabila dijumlah seluruh suara nasional partai parlemen tahun 2024 adalah 134.492.328 maka bantuan pemerintah yang dikucurkan adalah sekitar Rp 134.492.328.000,.

2. Dana Aspirasi Anggota DPR

Jumlah dana aspirasi yang diusulkan diterima anggota DPR, menurut Dr. Agus Riewanto, SH, MA dalam www.koran-jakarta.com merujuk pada Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (Dapil) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar total 11,2 Triliun atau kurang lebih 20 Miliar per anggota. Sebagai contoh, PDIP berdasar pada hitungan ini dengan jumlah anggota DPR 110 orang,

akan menerima sebesar Rp 2.200.000.000.000,-/tahun dan apabila berjalan selama 5 tahun akan menerima Rp 11.000.000.000.000,- (Sebelas Triliun). Ditambah dengan dana bantuan politik akan berjumlah sekitar Rp 11.025.387.279.000,-. Sedangkan untuk partai parlemen terbawah PAN dengan suara 10.984.003 maka akan mendapat bantuan politik sebesar Rp 10.984.003.000,- dan dengan jumlah anggota 48 orang akan mendapat dana aspirasi sebesar Rp 960,000.000.000,. (960 Miliar) dikalikan 5 tahun menjadi Rp 4.800.000.000.000,. Sehingga total yang diterima PAN adalah Rp 4.810.984.003.000,-. Pemberian dana bantuan politik dan aspirasi ini juga berlaku di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan APBD.

Sehingga nampak bahwa apabila usulan pendanaan yang diatas diimplementasikan, pendanaan yang diterima partai politik sudah cukup signifikan dan kemungkinan bisa dikatakan cukup untuk pembiayaan partai politik. Namun, akibat pendanaan yang tidak cukup, dalam menjalankan kompetisi dan kontestasi, beberapa "oknum" partai politik masih harus menggunakan cara untuk mendapatkan dana dengan cara-cara ilegal dan bertentangan dengan undang-undang (KKN)? jawabannya ada pada rezim sistem pemilu dan sistem kepartaian yang kita terapkan.

Dengan rezim sistem pemilu dan kepartaian yang sekarang diterapkan, maka pendanaan untuk membiayai kompetisi dan kontestasi antar partai dalam memenangkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden sangat besar dan seperti tidak ada batasnya, sehingga tercipta adagium bahwa kemenangan kontestasi pemilu berbanding lurus dengan kemampuan pendanaan dan logistik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan sistem pemilu dan kepartaian.

Merujuk pada dua Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu, dengan penerapan sistem pemilihan proposional tertutup dan hilangnya batasan parliamentary threshold, maka perlu didiskusikan model yang cocok diterapkan saat ini dan menjadi penyempurnaan atas pelaksanaan demokrasi. Beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Perlunya pemisahan waktu pelaksanaan pemilu yang berskala nasional dan daerah, yakni pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, berbeda waktunya dengan pemilu DPRD dan Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota.
2. Pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan anggota DPR berjalan dalam satu paket, dan masing-masing partai yang

lolos ikut pemilu bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden sendiri. Cara ini akan membantu menyelesaikan pembiayaan politik yang dobel akibat pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan anggota DPR secara bersamaan, baik yang dikeluarkan oleh KPU maupun Partai/Kontestan Pilpres. Dan juga bisa mengurangi beban logistik yang harus ditanggung oleh calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, secara otomatis Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mendapat dukungan parlemen yang besar. Bagaimana bila Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak mencapai suara 50%+1, maka dilanjutkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dengan peserta dari kontestan dengan suara terbanyak No. 1 dan No. 2. Hal yang sama juga berlaku pada level administrasi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Untuk mendukung konsep diatas, perlu diterapkan demokratisasi internal partai Politik, yakni :
 - a. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik Maksimal 1 periode (5 tahun), berlaku di semua tingkatan mulai Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (Nasional). Pembatasan ini penting untuk memberantas KKN dan munculnya politik dinasti di masing-masing tingkatan.
 - b. Partai Politik wajib menjalankan konvensi dalam

menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden, berlaku juga untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.

4. Untuk pendanaan partai politik dioptimalkan pendanaan melalui mekanisme bantuan politik dengan jumlah yang ditingkatkan setara dengan jumlah bantuan politik yang sekarang ditambah dengan dana aspirasi anggota. Sebagai contoh untuk PDIP akan mencapai Rp 11.025.387.279.000, (kurang lebih sebelas triliun dua puluh lima miliar). Untuk PAN adalah sekitar Rp 4.810.984.003.000,- sedangkan dana aspirasi yang diterima anggota dihapuskan, mengingat cara mengumpulkan aspirasi yang berubah seiring dengan perkembangan teknologi.
5. Penegakan hukum yang presisi dan konsisten. Aturan tentang konsekuensi pelanggaran pidana pemilu sudah ada, tinggal penerapannya yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif, termasuk didalamnya adalah "larangan politik uang" yang membuat biaya kontestasi dan kompetisi politik menjadi tidak ada batasnya dan tidak terukur. Secara khusus untuk Kepolisian RI diperlukan posisi untuk bisa membedakan antara tugas penegakan

pukum dan tugas menjaga keamanan masyarakat, selain itu harus netral dan tidak terlibat dalam proses kompetisi dan kontestasi.

PENEGAKAN HUKUM : MENGAMPUNI YANG KUAT, MENGHUKUM YANG LEMAH

Salah satu fenomena lain yang muncul pasca reformasi adalah lemahnya penegakan hukum, termasuk didalamnya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Padahal sejak tahun 2002 telah didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi RI sebagai amanat reformasi melalui UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Namun mengapa KPK sepertinya tidak memiliki dampak yang signifikan dalam pemberantasan KKN?. Kemudian pada masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo dilakukan revisi UU KPK yang mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu buah reformasi adalah penerapan desentralisasi. Selain kemajuan-kemajuan yang dicapai dengan adanya desentralisasi, terdapat juga eksekusi yang muncul. Salah satunya adalah juga terjadinya “desentralisasi” KKN. KKN

yang tadinya hanya terjadi di pemerintahan pusat, menyebar ke seluruh pemerintahan daerah juga. Sehingga terjadi “tsunami kasus Korupsi Kolusi Nepotisme”, dan karena saking banyak kasus korupsi, dalam melakukan penanganan, terkesan KPK melakukan tebang pilih. Hal ini menyebabkan muncul kesan adanya adu kekuatan dalam penegakan hukum. Kekuatan politik dan kekuatan uang, kesan adu kekuatan ini juga terjadi di lembaga penegak hukum yang lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Apalagi kalau penegakan hukum ini sudah menyangkut “kelompok politik” serta “kekuatan uang tertentu”, maka nampak sekali terjadi adu kekuatan dalam penegakan hukum.

Efek selanjutnya penegakan hukum yang harusnya menjadi alat memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), malah menjadi snowball baru sebagai pemicu tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lalu bagaimana menghentikan lingkaran setan KKN yang sudah terjadi ini?. Beberapa langkah perlu dipertimbangkan, antara lain :

1. Perlunya dikembalikan kewenangan KPK seperti semula dalam menangani korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, seperti saat didirikan tahun 2002. Namun dengan perubahan pada wilayah kerjanya, yakni dengan tugas khusus melakukan penegakan hukum pada penegak hukum. Jadi KPK hanya menangani penegakan hukum

dalam lingkup wilayah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

2. Perlunya diberikan kewenangan kepada KPK untuk bisa merekrut penyidik sendiri, diluar penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan.
3. Perlunya larangan unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman menjadi pimpinan KPK.

KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN

Selain wajah partai politik, sejak pasca kemerdekaan sampai sekarang, secara akumulasi masih terjadi ketimpangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Untuk melihatnya bisa dibaca dengan 3 indikator ini, yakni Indeks GINI, Penguasaan Aset Tanah dan Penguasaan Uang di bank.

Indeks GINI

Pada bulan Maret tahun 2024, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa rasio Gini Indonesia sebesar 0,379. Sehingga dengan indikator data ini menunjukkan masih terdapat ketimpangan. Skala rasio diukur dari angka 0 menuju 1 dan kalau dilihat dari skala ini ada ketimpangan yang terjadi, namun ketimpangan yang terjadi sudah dalam kategori sedang, karena sudah dibawah 0,4.

Penguasaan Aset Tanah

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria telah terjadi penguasaan 68% tanah daratan di Indonesia dikuasai oleh 1% kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Sisanya sebesar 32% lahan dikuasai oleh 99% masyarakat yang tersisa. Seperti 16 juta rumah tangga petani yang menguasai tanah-tanah kecil dibawah 0,5 Hektar.

Penguasaan Uang di Bank

Menurut Muhammad Ma'ruf, Head of CNBC Indonesia Research dalam wawancara yang disiarkan channel Youtube CNBC Indonesia, terdapat ketimpangan dalam penguasaan uang di bank dimana 0,02% penduduk menguasai uang di bank. Seperti data berikut :

NO	KATEGORI	PERSENTASE POPULASI	PEMILIK	RATA-RATA SIMPANAN
1	Kaya	0,02	53.920	98.462.517.066
2	Menengah	0,80	2.156.800.000	3.464.356.810
3	Miskin	63,05	169.982.800.000	5.926.789
4	Di bawah Miskin	36,13	97.406.480.000	0

Sementara itu, disampaikan pula bahwa 50 Orang Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 14 % Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.



Pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Roxy, Jakarta Barat, pada 27 Juni 2024.

Dari tiga indikator diatas, sejak pasca kemerdekaan telah muncul orang-orang kaya Indonesia dengan kekayaan yang fantastis, pada saat bersamaan masih banyak rakyat hidup dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang legal dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan kekayaan yang ada tersebut, dalam rangka memberantas kemiskinan.



Sumber : Antara/Bayu Pratama S

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2024, total penduduk miskin sebesar 9,03% atau setara dengan 25,22 juta orang. Bila dikonversi dalam satuan keluarga, dengan rata-rata rumah tangga miskin memiliki anggota 4,78 anggota keluarga, maka terdapat sekitar 5,27 juta keluarga miskin dengan rata-rata garis kemiskinan sebesar Rp 2.786.415,- per rumah tangga. Dengan garis kemiskinan

dihitung sebesar Rp 582.932,- /kapita/bulan, terdiri Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 433.906,- (74,44%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 149.026,- (25,56%).

Namun bila mengacu pada standar Bank Dunia, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 40%, Pengukuran ini dengan asumsi sudah memasukkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah dengan ukuran standar garis kemiskinan yang lebih tinggi, mengacu pada daya beli yang setara di berbagai negara (Purchasing Power Parity/PPP) tahun 2017 dimana diukur berdasarkan garis kemiskinan ekstrem US 3,2 Dollar, naik dari standar sebelumnya sebesar US 1,9 Dollar/kapita/hari.

Selain itu, Bank Dunia juga mengukur tingkat ketimpangan berdasar pada pengeluaran 40% penduduk terbawah. Bila pengeluaran lebih rendah dari 12 persen, maka masuk kategori ketimpangan tinggi. Bila antara 12-17%, masuk kategori ketimpangan moderat. Bila diatas 17%, masuk ketimpangan yang rendah. Berdasarkan ukuran ini, pada bulan September tahun 2024 pengeluaran kelompok 40% terbawah tercatat sebesar 18,41% dari total pengeluaran rumah tangga sehingga Indonesia sudah memasuki ketimpangan dengan kategori rendah.

Namun perlu dicatat bahwa program-program pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang dijalankan pemerintah yang bersifat jangka pendek dan ad hoc lah yang berhasil menurunkan kemiskinan dan ketimpangan seperti Program Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat dan lain-lain. Sehingga pengurangan ini bersifat jangka pendek dan semu. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan yang memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Perlu dilakukan redistribusi penguasaan aset tanah kepada lebih banyak masyarakat dengan cara terukur, konsisten dan berkelanjutan.
2. Perlu dilakukan optimalisasi pendanaan pembangunan dan investasi dari kelompok kaya, sehingga dana-dana yang tersedia bisa digunakan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa secara adil.
3. Perlunya program-program yang meningkatkan kesejahteraan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, seperti pelatihan-pelatihan dan pendidikan.
4. Perlu diprogramkan aturan-aturan anti konglomerasi baik yang berbasis wilayah, produk maupun scope usaha untuk melindungi usaha kecil dan menengah.

PENDIDIKAN : KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI TEKNOLOGI

Pada tahun 911 SM, Mpu Hubayun telah menciptakan Kalender Jawa, artinya manusia Jawa telah menguasai ilmu dan teknologi saat itu, yang dimungkinkan untuk menciptakan penanggalan (kalender). Bagaimana kah kita bisa mengulang penguasaan teknologi seperti itu? Pertanyaan tersebut bersifat retorik, sebagai introspeksi untuk kita memahami dan mengelola Pendidikan Nasional saat ini.

Untuk melihat pendidikan kita pertama perlu dilihat adalah pemerataan kesempatan pendidikan yang bisa dilihat melalui Angka Partisipasi Murni. Menurut catatan Kemdikbud tahun 2018, angka partisipasi Sekolah Dasar/ Sederajat mencapai 93%, angka partisipasi untuk Sekolah Menengah Pertama/Sederajat sebesar 76,9%, sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah/Sederajat sebesar 63,7%. Sedangkan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi sebesar 39,37%. Sehingga masih terdapat anak-anak yang belum bersekolah. Khusus untuk APK perguruan tinggi angka kita masih lebih rendah bila di banding Malaysia 43%, masih perlu ditingkatkan program-program yang sifatnya memperluas akses pendidikan.



Tenaga kerja terampil industri otomotif

Sumber : katadata.co.id

Sedangkan dari sisi kualitas bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan score PISA yang menunjukkan literasi membaca, matematika dan sains. Menurut data yang dikeluarkan BPS, IPM Indonesia pada tahun 2024 mencapai 75,02 berada pada skala sedang/ menengah. Dalam Human Development Index (HDI) yang dirilis *United Nations Development Programme (UNDP)*

Indonesia berada di urutan ke 112 dunia. Sedangkan untuk skala Asia Tenggara, berada di urutan dibawahnya Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura.

Menurut Wakil Rektor I Bidang Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof. Madlazim, negara yang memiliki IPM tinggi cenderung memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, ada hubungan kuat antara tata kelola dan kualitas pembangunan manusia, sehingga faktor ini juga perlu dibenahi untuk meningkatkan Pembangunan Manusia Indonesia.

Sedang bila merujuk pada data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2018 berada dalam peringkat 69 dari 74 negara dengan nilai 371 poin. Bila dilihat dari sini, maka nampak sekali kemampuan literasi membaca, matematika dan sains siswa Indonesia masih rendah.

Sedangkan dilihat dari sisi inovasi teknologi, sejak reformasi tidak ada dokumen roadmap teknologi yang menjadi prioritas bangsa yang terencana, terukur dan berkelanjutan. Berbeda dengan masa Orde Baru, dimana roadmap dan tahapan-tahapan penguasaan dan inovasi teknologi disusun dan dilaksanakan secara simultan.

Oleh karena itu, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Program Pemerataan Akses Pendidikan tetap perlu dilakukan, sehingga keputusan tentang Kebijakan Wajib Belajar 10 tahun benar-benar mendapatkan dukungan politik dan anggaran. Bersamaan dengan itu perlu segera diprogramkan Wajib Belajar 12 tahun, sehingga rata-rata penduduk akan berpendidikan menengah akan meningkat dari 63% menjadi 100%.
2. Perlunya program peningkatan kualitas pendidikan khususnya pada kemampuan literasi membaca, matematika dan sains.
3. Perlunya dibuat sebuah roadmap teknologi yang menjadi tujuan, prioritas bangsa dan diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, dijelaskan antara lain :

1. Kepentingan Nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok

yaitu, Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusa-ntara. Ketiga, Mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu.

2. Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang disiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem Pertahanan Semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Disiapkan secara dini berarti Sistem Pertahanan Semesta dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmiliter maupun hibrida. Berbagai jenis ancaman ini secara akumulatif dapat dikelompokkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

USULAN DAN HARAPAN

Dalam realitasnya Indonesia sebagai bangsa harus berinteraksi dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan nasional masing-masing. Saling pengaruh antar kepentingan nasional terjadi, dan saling mempengaruhi ini sudah tidak dalam kerangka komunis dan non komunis lagi. Pasca perang dingin berakhir, munculah dua gagasan dalam kerangka hubungan internasional yang mengemuka, pertama dikemukakan oleh Samuel Huntington dalam bukunya "The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order" yang menjelaskan bahwa pasca perang dingin, hubungan antar negara akan diwarnai dengan konflik antar peradaban, antara Peradaban Barat dan Peradaban Timur secara khusus Peradaban Islam. Kemudian yang kedua gagasan Francis Fukuyama, dalam bukunya "The End of History and The Last Man" yang menyatakan pemenang dalam perang dingin adalah ideologi liberalisme dan kapitalisme.

Maka tantangan selanjutnya sebagai bangsa adalah bagaimana menghadapi liberalisme dan kapitalisme, yang muncul dalam berbagai wajah, wujud dan bentuk melalui kepentingan nasional yang muncul dari negara-negara dan organisasi dunia yang berinteraksi dengan Indonesia.

Oleh karena itu, beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Memperkuat kemandirian nasional. Kemandirian nasional adalah wajah lain dari ketahanan nasional. Kemandirian yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya adalah kemandirian dalam industri pertahanan.
2. Mendorong produk-produk budaya dan ekonomi dalam negeri yang unggul sehingga menumbuhkan "mode" budaya cinta pada bangsa sendiri sebagai turunan dari konsep cinta tanah air.

Setelah pokok bahasan diatas, gerakan nasional apakah yang perlu dilakukan sebagai anak bangsa dan sebagai bangsa agar Indonesia yang adil makmur tercapai? Merujuk pada Naskah Kelima UUD 1945 BAB I, Pasal 1 Ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk ayat yang pertama, setelah melalui pengalaman berbangsa dan bernegara yang panjang, akhirnya pada tahun 2002 disepakati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final dan tidak bisa diubah. Diputuskan saat amandemen ke-4 UUD 45, bahwa Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah bentuk final dan tidak bisa diubah. Tercantum dalam BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR, pasal 37 ayat 5 berbunyi : "Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Bersamaan dengan itu dijalankanlah implementasi ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Melalui proses pemilihan umum. Namun proses pemilu ini masih nampak seperti demokrasi procedural, sehingga masih kurang memiliki dampak yang optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka gerakan selanjutnya adalah sesuai amanat konstitusi dalam BAB I, pasal 1, Naskah Kelima UUD 1945, yakni ayat (3) " Negara Indonesia adalah negara hukum". Gerakan yang dilakukan adalah membuat Indonesia menjadi Negara Hukum. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum mencakup :

1. Keberadaan hukum yang mengikat. Artinya hukum harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga maupun pemerintah.
2. Prinsip Kedaulatan Hukum. Makna ini merujuk pada bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Prinsip kedaulatan

hukum menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang tidak memihak dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Jadi adagium yang berkembang di masyarakat “Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum, namun tidak sama didepan penegak hukum” harusnya tidak terjadi di Indonesia.

3. Penegakan Hukum dan Keadilan. Negara hukum menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Penegakan hukum harus adil, bebas dari intervensi kepentingan individu dan kelompok, baik melalui intervensi politik, uang dan atau kedua-duanya. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan yang independen dan transparan sehingga bisa menyelesaikan sengketa secara adil.
4. Kepastian Hukum. Indonesia sebagai negara hukum artinya negara memiliki adanya kepastian hukum yang diterapkan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Azas ini juga menjadikan semua warga negara harus mengetahui hak, kewajiban serta konsekuensi perbuatan hukum yang dilakukannya. Kepastian hukum menjadi dasar kesepakatan bersama yang menjadi landasan bagi individu dan institusi dalam mengambil keputusan.
5. Perlindungan Hak dan Kebebasan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak

asasi manusia serta kebebasan individu yang dijamin oleh Undang-Undang.

6. Tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip keadilan, berintegritas dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah adalah pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai hukum.

Selanjutnya, bagaimana operasionalisasi gerakan ini? Pertama-tama perlu disadari bersama, sebagai anak bangsa dan sebagai bangsa bahwa “Gerakan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum” ini adalah langkah yang logis dan rasional dalam rangka pembaharuan Nusantara untuk mencapai cita-cita luhur, leluhur, sesepuh dan ratusan ribu bahkan jutaan pahlawan bangsa yang telah berkorban sampai dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Hal ini harus menjadi kesadaran bersama sebagai anak bangsa dan sebagai bangsa Indonesia secara bersama.

Kemudian langkah selanjutnya adalah merujuk pada Statemen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara Penutupan Pendidikan Sespimti Polri Pendidikan Reguler ke-30, Sespimen Polri Pendidikan Reguler ke-61

dan Sespimma Polri Angkatan ke-66 di Lembang Jawa Barat yang menyatakan bahwa “Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah, bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus menjadi teladan sehingga bawahannya akan meneladani. Karena kita tidak mungkin diikuti kalau kita tidak memulai yang baik, kita tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan, harus mulai dari pemimpin dan diri sendiri”.

Oleh karena itu, gerakan ini memohon dengan sangat para Pemimpin Indonesia saat ini, secara khusus Bapak Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto, yang sekaligus adalah Ketua Umum Partai Gerindra, untuk dengan sungguh-sungguh dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan saat ini, benar-benar mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum.

Kemudian para pemimpin yang lain yang menguasai parlemen, Presiden RI ke-5 Ibu Megawati Soekarno Putri, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Bapak Muhaimin

Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Salim Segaf Aljufri sebagai Ketua Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Bapak dan Ibu, dengan sistem politik yang kita miliki saat ini, secara bersama-sama adalah penentu berjalannya Negara Indonesia menjadi Negara Hukum, baik melalui Undang-Undang maupun pemilihan para pimpinan pelaksana penegakan hukum, yakni Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Kapolri dan Jaksa Agung.

Dan bagi anak bangsa yang mencintai tanah air, mari kita ikut mendukung terciptanya Indonesia menjadi Negara Hukum dengan cara masing-masing yang bisa kita lakukan baik sebagai individu maupun berkelompok demi terlaksananya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :

“NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM”

DAFTAR PUSTAKA

- Aa Kustia Sukamaprawira (2007). *Intelijen: Dilema dan Tantangan*. Jakarta: CSICI.
- Adam Roberts (1976). *Bangsa-bangsa Menyandang Senjata*. The International Institute of Strategic Studies.
- Angga Nurdin Rachmat (2015). *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arwan Tuti Artha (2007). *Dunia Spiritual Soeharto: Menelusuri Laku Ritual, Tempat dan Guru Spiritualnya*. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.
- Asy'ari, Abuhasan (2009). *Catatan 50 Tahun Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Dian Rakyat. ISBN 979-523-910-4.
- A.S.S Tambunan, Soebijono, Hidayat Mukmin (1985). *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Nugroho Notosusanto, Editor. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Atlantis - The Lost Continent Finally Found. Jakarta: PT. Ufuk Publishing House, 2009. ISBN 978-602-8224-62-8.
- Boediono (2016). *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Cetakan Ke-1, Juni 2016. Cetakan Ke-2, Agustus 2016. Cetakan Ke-3, Desember 2016. Mizan, Bandung.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia.

LEMHANNAS (1981). Bunga Rampai: Wawasan Nusantara I. Skala Indah, Universitas Andalas.

David Jenkins (2010). Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975 – 1983. Depok: Komunitas Bambu.

Anne Booth dan Peter McCawley (Penyunting). Ekonomi Orde Baru. LP3ES.

Feith, Herbert (1995). Soekarno – Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Feith, Herbert (1999). Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Feith, Lance Castles (1988). Pemikiran Politik Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Kacung Marijan, Prof. Dr. (2010). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca – Orde Baru. Prenada Media Group.

Harold Croach (1986). Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht (2011). *Sejarah Alternatif Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe.
- M.C. Ricklefs (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*. Serambi.
- Muhaimin, Yahya A. (1990). *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950 – 1980*. Jakarta: LP3ES.
- Munandar, Agus Aris, dkk. (2018). *Wilwatikta Prana: Kajian Arkeologi-Sejarah Zaman Majapahit*. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra.
- Mohtar Mas'oe'd (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, M. (2001). *Manusia Indonesia*. (5th ed.; 8th printing, February 2023). Yayasan Obor Indonesia.
- Herald Van Der Linde (2024). *Majapahit*. Moonsoonbooks.
- Heri Purwanto (2023). *Pararaton: Biografi Para Raja Singosari-Majapahit*.
- Achdiat K. Mihardja (2008). *Polemik Kebudayaan*. Edited by Tim Editor Balai Pustaka. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero). ISBN 979-666-195-0.
- Henry Tudor (1984). *Mitos dan Ideologi Politik: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT Sangkala Pulsar.

- Dwi Lestari (2018). Sejarah Kekuasaan Raja-Raja Jawa. Edited by Sony Adams, proofread by Arif Ishartadi. Yogyakarta: SOCIALITY. ISBN: 978-602-5907-43-2.
- Peri Mardiyono (2023). Sejarah Kerajaan Bawahan. Edited by Lanang. Yogyakarta: Araska. ISBN: 978-623-7910-07-7.
- Prof. Dr. Slamet Muljana (2006). Nagarakretagama. Yogyakarta: LKAS. ISBN 979-25-5254-5.
- Munadjat Danusaputro, Prof. Mr. St. (1981). DANASA N (Dalam Pendidikan dan Kebudayaan). Penerbit Alumni, Bandung.
- Teguh Panji (2015). Kitab Sejarah Terlengkap Majapahit. Laksana, Yogyakarta.
- Purwadi (2022). Pramoda Wardani Meniti Puncak Kejayaan. Yogyakarta: Bangun Bangsa.
- M.C. Ricklefs (2012). Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang. PT Bentara Aksara Cahaya. ISBN: 978-623-8371-03-7.
- M. Dawam Rahardjo (2011). Nalar Ekonomi Politik Indonesia. PT Penerbit IPB Press. ISBN: 978-979-493-322-0.
- Damaika Saktiani, dkk. (2019). Kakawin Nagarakertagama : Teks dan Terjemahan. Yogyakarta: Narasi. ISBN 978-602-5792-94-6.

Sartono Kartodirjo, Marwati Joened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto (1976). Sejarah Nasional Indonesia Buku I-VI. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Indria Samego, Dr. (Editor) (2001). Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem. Jakarta: The Habibie Center.

Tempo: Soeharto (2008). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Tan Malaka (2014). Menuju Republik Indonesia. Bandung: Segarsy.

Tim ProPatria Institute (2006). Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta: ProPatria Institute.

Tulus T.H. Tambunan (2016). Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen dan Butir-Butir Nilai Pancasila.

Bernard H.M. Vlekke (2016). Nusantara: Sejarah Indonesia Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Alfred Russel Wallace. *The Malay Archipelago*. Translated by Ahmad Asnawi, S.Pd and H. W.I. Olthof.

H. W.I. Olthof (1941). *Babad Tanah Jawi*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.

TENTANG PENULIS



SRI HARJONO, lahir di Klaten, pada tanggal 14 April 1971. Menempuh Pendidikan tingkat SD dan SMP di Cawas. Selanjutnya menempuh Pendidikan di SMA N 1 Klaten. Kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada.

Penulis aktif berkegiatan di Komunitas Pelestari Seni dan Budaya Nusantara (KPSBN), tahun 2014 sampai sekarang, pernah menjadi Anggota Tim Ahli Ketua, Anggota dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (WANTIMPRES RI) tahun 2020 - 2023.





PERGERAKAN MENUJU PEMBAHARUAN NUSANTARA

YPPTI^e

Yayasan
Pengembangan Pendidikan
& Telematika Indonesia

NUSANTARA wilayah yang sekarang kita diami ini, sudah memiliki sejarah yang panjang sebagai entitas bangsa dan peradaban. Nusantara pernah dibangkitkan dua kali, pertama, berbentuk Kerajaan Majapahit. Yang ke-dua, dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita jalani sekarang. Apakah Nusantara akan dibangkitkan lagi? Pola-pola apa sajakah yang terbaca dalam dalam proses kebangkitan yang pertama Kerajaan Majapahit dan kebangkitan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apa saja kah yang perlu kita lakukan, sebagai anak bangsa dan sebagai bangsa, untuk melanjutkan kebangkitan yang sudah terjadi? Atau bahkan untuk menjemput kebangkitan baru Indonesia? Buku ini mencoba mendiskripsikan arah dan langkah yang perlu dilakukan sebagai anak bangsa dan sebagai bangsa menuju Indonesia yang Adil dan Makmur.



Penulis, bersama Dr Purwadi, pada saat pentas wayang kulit di Klaten, Jawa Tengah.